

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soetomo (2008) dan Kartasasmita (1997), pada tahun 1950-1970an sebagian negara dunia ketiga memperoleh bantuan teknologi dan modal asing dari negara-negara barat. Bantuan tersebut disambut sangat baik, sebab harapannya melalui konsep *trickle down effect* akan diperoleh: (1) perluasan kesempatan kerja, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) keadilan, dan (4) kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, harapan tersebut ternyata tidak pernah terwujud, sebab keuntungan dari pertumbuhan ekonominya hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses kepada penguasa (Kartasasmita, 1997 dan Mardikanto, 2010b).

Akhirnya, paradigma tersebut dianggap gagal karena justru menciptakan ketergantungan baru bagi masyarakat lemah. Oleh karenanya, para Ahli berupaya mengembangkan paradigma baru yang lebih berpihak kepada masyarakat lemah yaitu: *people-centred*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable* (Chamber, 1995 dalam Kartasasmita, 1997 dan Soetomo, 2008). Tujuan utamanya adalah membangun masyarakat bukan barang. Paradigma *people centered* diyakini akan lebih memberi kemungkinan terjadinya: (1) pembangunan yang manusiawi, (2) mendorong munculnya inisiatif, dan (3) kreativitas masyarakat lokal (Soetomo, 2008). Dalam perkembangannya, paradigma ini lebih dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat, mulai banyak dibicarakan pada tahun 1970an dan terus berkembang (Hikmat, 2001). Di Indonesia, mulai dikenalkan sejak adanya Program Inpres No. 5/1993 tentang Inpres Desa Tertinggal. Sejak tahun 2001 *World Bank* menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak untuk mengurangi kemiskinan (Mardikanto, 2009).

Menurut Syahyuti (2006 dan 2007), istilah pemberdayaan berasal dari alih bahasa *empowerment* yang diartikan sebagai memberi kuasa atau memberi wewenang kepada *Si Obyek* agar menjadi kuasa untuk melakukan sesuatu. Makna penting dari istilah kuasa, bukan saja dalam hal memperoleh sesuatu yang diharapkan dengan lebih baik, tetapi secara luas berkaitan pula dengan kemampuannya dalam memperjuangkan harga tawar dan hak-hak politiknya (Mardikanto, 2009).

Hal tersebut dipertegas oleh Ife *et al* (2008) dan Mardikanto (2010b) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada proses, yakni bagaimana setiap orang menjadi cukup kuat atau mampu berpartisipasi dalam berbagai suasana, serta mengontrol kekuatan yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut: (1) Ife *et al* (2008), (2) Anwarudin *et al* (1992), (3) Hikmat (2001), (4) Suparjan dan Hempri Suyatno (2003), (5) Sumodiningrat (2000) dalam Sulistyani (2004), (6) Irawati, 2006, (7) Soetomo (2009 dan 2011) bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat 2 (dua) unsur utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu: (1) pemberian kekuasaan (*power*) dan (2) pengembangan kapasitas kepada penerima manfaat.

Untuk memperoleh kekuasaan dan kapasitas itu, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan. Hasilnya adalah institusi-institusi⁵ lokal atau pola kegiatan yang menjadi embrio terbentuknya pranata-pranata sosial. Jika institusi sudah terbentuk, proses pemberdayaan masyarakat (petani) dalam mewujudkan kemandirian mereka akan semakin menunjukkan hasilnya.

Adapun agen (aktor) yang berperan sebagai pemberi kekuasaan dan pengembangan kapasitas masyarakat (petani) dapat berasal dari internal kelompok / masyarakat dan dari pihak eksternal. Peran aktor pemberdaya lebih ditekankan sebagai pemungkin terjadinya proses pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, sehingga penerima manfaat dapat menentukan masa depannya

⁵ Institusi-institusi lokal dalam pengertian proses pemberdayaan ini dapat dimaknai sebagai: (1) lembaga formal, (2) pranata sosial, (3) kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kegiatan keseharian atau melembaga dan memiliki pola-pola tertentu. Institusi ini merupakan unsur penting dalam proses pengembangan kapasitas masyarakat (Soetomo, 2009).

sendiri (Soetomo, 2011). Artinya, fungsi dari aktor pemberdaya adalah sebagai sarana untuk merangsang munculnya kapasitas dari penerima manfaat sendiri (Soetomo, 2009).

Memperhatikan hal tersebut, maka dalam proses pemberdayaan masyarakat diharapkan terbentuk institusi yang menjadi embrio terjadinya proses kemandirian masyarakat. Institusi lokal ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai: (1) sarana untuk memfasilitasi tindakan bersama, dan 2) peningkatan kekuasaan bersama. Apabila kedua fungsi itu terwujud, dapat menjadi petunjuk bahwa dimasa depan akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dalam tujuan tertentu (Soetomo, 2009 dan 2011).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, menurut Parson *et al* (1994) dalam Mardikanto (2010b) lebih ditekankan pada upaya pemberian: (1) pengetahuan, (2) ketrampilan, (3) kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Supriyanto dan Subejo (2004) dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan: (1) pengembangan sumberdaya lokal, (2) tindakan secara bersama dan (3) pengembangan jejaring kemitraan. Pentingnya jejaring kemitraan sebab tidak ada satu aktor pemberdaya yang mampu melakukannya sendirian (Ife *et al.*, 2008 dan Mardikanto, 2010b). Secara analogi, dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat digunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (Uno, 2009).

Dalam transper pengetahuan dan ketrampilan kepada orang dewasa, menurut Lindeman dalam Uno (2009), akan sukses jika menggunakan pendekatan: (1) kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingannya, (2) kesesuaian dengan situasi kehidupannya, (3) pengalaman petani, (4) pemberdaya hanya berperan sebagai pemungkin terjadinya proses pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, dan (5) menghormati perbedaan pendapat.

Dari hasil kajian pustaka tentang upaya mendorong petani untuk melaksanakan alih teknologi pertanian organik di wilayah: Asia, Afrika, China dan Eropa dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut akan berhasil jika:

- 1) Terdapat kejelasan tujuan dalam alih teknologi pertanian organik telah meningkatkan keyakinan petani di wilayah: (1) Eropa (Acs *et al.*, 2005), (2) Belanda (Acs *et al.*, 2009), (3) Oya Nigeria (Ajewole *et al.*, 2010), (4) Chimaltenango di Guatemala (Oleas *et al.*, 2010), (5) Thailand bagian Utara (Jierwiryapant *et al.*, 2012), (6) Republik Chehnya (Mala *et al.*, 2013) untuk melaksanakan alih teknologi pertanian organik,
- 2) Terdapat agen (aktor) pemberdaya dalam penggunaan pupuk organik di wilayah: (1) Eropa (Padel *et al.*, 2001), (2) Kota Aya di Jepang (Kohmoto., 2005), (3) Andalusia Spanyol (Lopez *et al.*, 2007), (4) Oya Nigeria (Ajewole *et al.*, 2010), (5) Chimaltenango di Guatemala (Oleas *et al.*, 2010), (6) Denmark dan Inggris (Daugbjerg *et al.*, 2011), telah mampu mendorong petani untuk melaksanakan alih teknologi pertanian organik,
- 3) Terdapat petani lain yang sudah melaksanakan penggunaan saprodi organik di wilayah: (1) Eropa (Padel *et al.*, 2001), (2) Andalusia Spanyol (Lopez *et al.*, 2007), (3) Jerman Barat (Best., 2009), telah memberikan semangat dan dorongan untuk melaksanakan alih teknologi pertanian ortanik,
- 4) Terdapat kejelasan teknologi organik telah meningkatkan keyakinan petani di wilayah: (1) Kota Aya di Jepang (Kohmoto., 2005), (2) Thailand bagian Utara (Jiewiriyapant *et al.*, 2012), (3) Propinsi Khon Kaen Thailand bagian Timur Laut (Supaporn *et al.*, 2013) untuk melaksanakan alih teknologi pertanian organik,
- 5) Dukungan eksternal di wilayah: (1) Kota Aya di jepang (Kohmoto., 2005); Rouson (2007), (2) Nurwegia (Koesling *et al.*, 2008), (3) Kallas *et al* (2009), (4) Babol Iran (Sharifi *et al.*, 2010), (5) Chimaltenango di Guatemala (Oleas.,

2010) telah dapat meyakinkan petani untuk melaksanakan alih teknologi pertanian organik,

- 6) Adanya kepastian pasar produk pertanian organik di wilayah: (1) Eropa (Acs., 2005) (2) Nigeria Faturoti *et al* (2006), (3) Belanda Acs *et al* (2007), (4) Belanda (Acs *et al.*, 2009), (5) Jerman Barat (Best., 2009), (6) Macedonia Yunani (Oxouzi, E dan Papanagiotou. E. 2010) dan (7) Babol Iran (Sharifi *et al.*, 2010) telah mampu mendorong petani untuk melaksanakan alih teknologi pertanian organik.

b. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan proses belajar dan mengajar secara bersama bertujuan untuk memberikan: (1) pencerahan, (2) dorongan, dan (3) motivasi agar penerima manfaat memiliki kemampuan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang (Syahyuti, 2006). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dapat pula diartikan sebagai penyuluhan pembangunan (Slamet, 2000 dalam Mardikanto, 2010b) dan Syahyuti (2006) menyebutnya sebagai proses pembelajaran menuju perubahan yang lebih baik.

Berdasar hal tersebut, maka secara analogi pengertian pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik dapat dimaknai sebagai proses pemberdayaan petani yang dilakukan oleh aktor pemberdaya dalam rangka: memberikan kekuasaan dan pengembangan kapasitas kepada petani agar memiliki: (1) kesadaran, (2) kekuasaan, (3) kemampuan dan (4) kemauan untuk mewujudkan kemandiriannya dalam alih teknologi pertanian organik secara berkelanjutan.

Jika, pengetahuan tentang alih teknologi pertanian organik telah tertanam di dalam diri petani dan menjadi kegiatan rutinitas, maka telah terbentuk embrio kemandirian petani. Jika pola rutinitas tersebut berkembang menjadi jejaring dan

mempengaruhi terbentuknya tata aturan baru di dalam suatu masyarakat, maka kemandirian petani dalam alih teknologi pertanian organik di masa depan menjadi semakin mudah terwujud. Kondisi tersebut akan menjadi semakin kuat, jika terdapat kepastian pasar yang menguntungkan bagi petani.

Sebagai contoh, hasil penelitian Koesling *et al* (2008) disimpulkan bahwa alasan utama petani di Norwegia dalam menerapkan sistem pertanian organik karena adanya kepastian pasar yang menguntungkan. Hal senada, dikemukakan Zakaria (2006) bahwa untuk dapat melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani, perlu didorong adanya peningkatan daya saing produk lokal dan mendorong menjadi *market local leader*. Sebaliknya, penolakan petani di wilayah Oyo Nigeria dalam menerapkan sistem pertanian organik karena tidak adanya kepastian pasar (Ajewole *et al.*, 2010).

Memperhatikan hal tersebut, maka komponen pasar yang menguntungkan perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik. Pentingnya ketersediaan pasar sebagaimana disebutkan Ife *et al* (2008), bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat perlu adanya desain strategi yang spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

c. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu azas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir atau bertindak (Redaksi, 2002). Secara bebas dapat pula dimaknai sebagai aturan main yang menjadi pedoman berlangsungnya suatu fungsi. Kepahaman aktor pemberdaya terhadap prinsip pemberdayaan menjadi sesuatu yang sangat mendasar, sebab dalam prakteknya sering terjadi kesalahan orientasi dan penyimpangan makna yang sesungguhnya (Soetomo, 2011). Penggunaan konsep pemberdayaan sering disalah tafsirkan. Sentuhan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sudah diartikan sebagai pemberdayaan, padahal justru menimbulkan berbagai ragam ketergantungan baru (Soetomo, 2011).

Konsep pemberdayaan masyarakat (petani) tersebut, hanya diperuntukkan kepada masyarakat dalam konotasi: (1) tidak mampu, (2) tidak memiliki kekuasaan, (3) tidak memiliki pengetahuan, sehingga perlu diberdayakan agar di masa mendatang mampu mewujudkan kondisi yang lebih baik serta mampu mengontrol faktor eksternal. Dalam kondisi sarana dan komunikasi sudah sangat maju, maka bagi masyarakat tertentu pengetahuan dan ketrampilan sudah bukan menjadi pembatas.

Mengingat pemberdayaan merupakan sistem dalam pendidikan petani (UU No 19 Tahun 2013), maka menurut Mardikanto (2010b) dalam proses pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip: (1) mengerjakan atau menerapkan sesuatu secara terus menerus, (2) menghasilkan pengaruh yang lebih baik bagi penerima manfaat dan (3) dalam kegiatannya melibatkan pihak-pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut dapat efektif jika dalam pelaksanaannya memperhatikan relung budaya setempat (Bangun, 2012).

Menurut Ife *et al* (2008) hambatan yang sering dialami dan dirasakan dalam praktek pemberdayaan masyarakat adalah tidak sesuaianya antara program dengan kemauan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pendefinisian kebutuhan masyarakat perlu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri (Ife *et al.*, 2008). Agar perspektif ini dapat berhasil, maka: (1) masyarakat perlu memiliki akses kepada pendidikan dan informasi, (2) perlu adanya penghormatan dan pengakuan terhadap kearifan lokal dan pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat (Ife *et al.*, 2008).

Menurut Ife *et al* (2008), dalam pengembangan masyarakat dikenal adanya 26 prinsip yaitu: (a) Prinsip ekologis: (1) holisme, (2) keberlanjutan, (3) diversitas, (4) pengembangan organik, (5) pengembangan yang seimbang, (b) prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia: (6) untuk mengatasi stuktur yang merugikan, (7) untuk mengatasi wacana yang merugikan, (8) pemberdayaan, (9) definisi kebutuhan, (10) hak asasi manusia, (c) Nilai-nilai lokal: (11) nilai-nilai pengetahuan lokal, (12) nilai-

nilai budaya lokal, (13) nilai-nilai sumberdaya lokal, (14) nilai-nilai ketrampilan masyarakat lokal, (15) nilai-nilai proses lokal, (d) prinsip proses: (16) proses-hasil-
visi, (17) integritas proses, (18) penumbuhan kesadaran, (19) partisipasi, (20)
kerjasama dan konsensus, (21) langkah pembangunan, (22) perdamaian dan anti
kekerasan, (23) inklusivitas, (24) pembangunan masyarakat, (e) prinsip global dan
lokal: (25) hubungan antara global dan lokal, (26) anti praktek kolonial.

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Walaupun pada praktek di lapangan terdapat beragam pengertian pemberdayaan, tetapi pada dasarnya tujuan akhir adalah terjadinya perubahan yang permanen terhadap kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan di masa depan (Syahyuti, 2006). Secara analogi, tujuan utama dari pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik adalah menjadikan petani dan atau kelompok tani dapat mewujudkan kemandiriannya dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik.

Kata *mandiri* dalam pengertian ini tidak dimaknai dikerjakan sendiri, tetapi lebih mendasarkan pada adanya kemauan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu, baik secara sendiri dan atau melalui jaringan kerjasama kemitraan. Sebagaimana disebutkan oleh Nawawi dan Martini (1994) dalam Sumardjo (1999) bahwa kemandirian dapat diartikan sebagai *autonomy* dan bukan sebagai individualisme. Oleh karenanya, dapat dimaknai pula sebagai kehendak manusia yang didasarkan pada prinsip: keyakinan diri dalam berkehendak dan bertindak yang bebas tanpa adanya ketergantungan dari orang lain (Sumardjo, 1999).

e. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat dua aspek utama yaitu: (1) pemberian kekuasaan dan (2) pengembangan kapasitas. Dalam prakteknya, lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat sering diartikan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Dalam hal ini, Mardikanto⁶ (2010b) mengusulkan adanya 4 (empat) bina yaitu: (1) bina sumberdaya manusia, (2) bina usaha, (3) bina kelembagaan dan (4) bina lingkungan yang dapat dimaknai sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi obyek sekaligus subyek sasarannya adalah masyarakat, petani dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun unsur dasar dalam pemberdayaan masyarakat adalah: (1) pemberian kekuasaan (power) dan pengembangan kapasitas penerima manfaat.

Pengembangan kapasitas adalah suatu proses peningkatan kemampuan: individu, kelompok serta jejaring diantaranya, agar memiliki kapasitas untuk melaksanakan peran tertentu (Mardikanto, 2010a dan 2010b). Dalam hal ini, pengertian kapasitas tidak bersifat pasif, tetapi merupakan proses dinamis dan berkelanjutan (Mardikanto, 2010a dan 2010b). Dipertegas oleh Bangun (2012), Balcazar *et al* (2008), Mohamad *et al* (2012) bahwa dalam pengembangan kapasitas, telah terkandung suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan eksistensinya.

Setiap individu dan atau masyarakat, pada dasarnya memiliki kapasitas dan potensi masing-masing (Ife *et al.*, 2008). Sebagaimana disebutkan oleh Tuner (2006) bahwa sejak jaman pra revolusi industri di Eropa, para petani memiliki kemampuan untuk berdaya dan mandiri jika tersedia alat-alat produksinya. Mengingat relung: fisik, sosial, ekonomi dan budaya, maka dalam proses pemberdayaan masyarakat perlu digunakan strategi pengembangan kapasitas yang spesifik (Ife *et al.*, 2008).

Adapun untuk pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas dapat digunakan dengan pendekatan dialogis (Ife *et al.*, 2008 dan Arthana, 2010). Pendekatan ini akan membangun rasa empati, saling memahami dan menghargai orang lain, sehingga akan menghindari terjadinya tindakan kesewenang-wenangan

⁶ Penuturan Bapak Prof. Dr. Ir. Mardikanto, MS ketika menjawab pertanyaan Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS tentang istilah *bina-bina* dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada Seminar hasil penelitian Disertasi saudara Aziz Muslim (20 Maret 2014) di Pasca Sarjana UNS, disebutkan bahwa istilah *bina* pada teks aslinya bermakna *pengembangan kapasitas* (T182).

dari pihak tertentu (Marcuse, 1964 dan Fay, 1987 dalam Ife *et al.*, 2008; Ryacudu, 2011). Dari perbincangan interpersonal akan memiliki dampak yang sangat lama dan menjadi pengontrol bagi kedua belah pihak (Ife *et al.*, 2008).

Sasaran dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan kapasitas: (1) sumberdaya manusia, (2) usaha, (3) kelembagaan dan (4) lingkungan. Obyek sekaligus subyek sasarnya adalah petani. Menurut Syahyuti (2006), keberhasilan dalam pengembangan kapasitas masyarakat sangat tergantung pada kesehatan institusi⁷.

1) Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang berujung pada pengembangan sikap dan perilaku individu petani (Soetomo, 2009). Dalam hal tersebut, menurut Mardikanto (2010b) meliputi: (1) pengembangan kapasitas kepribadian yang mempengaruhi nilai, sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian, (2) pengembangan kapasitas keprofesian yang meliputi: kemampuan teknis, sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial.

Dalam konteks pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik, maka kapasitas sumberdaya manusia ini terkait dengan pengembangan sikap perilaku petani terhadap: (1) pentingnya memahami bahaya penggunaan pupuk dan pestisida kimia, (2) pentingnya memahami manfaat penggunaan pupuk dan pestisida organik, (3) pentingnya menggunakan pupuk dan pestisida organik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka yang bersangkutan perlu memiliki: (1) pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung, (2) motivasi melakukan kerja keras, (3) kemampuan dalam melaksanakan adaptasi dengan lingkungannya, (4)

⁷ Pengertian institusi yang sehat adalah: (1) kepemimpinan yang memiliki visi jelas dan didukung anggotanya, (2) ketersediaan finansial, (3) ketersediaan SDM yang memadai, (4) prosedur kerja jelas, (5) insentif bagi pengurus dan anggota, (6) ada forum komunikasi sebagai wadah penyampaian ide, gagasan serta evaluasi bersama dan (7) ada konsensus bersama dalam mewujudkan tujuan organisasi (Syahyuti, 2006).

kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisinya (Bangun, 2012).

Adapun untuk mewujudkan kemampuan diri sendiri, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) dalam Soetomo (2009), terdapat tiga tahap penting yaitu: (1) penyadaran, (2) pendayaan, (3) pengembangan kapasitas. Oleh karenanya, masyarakat perlu memiliki kesadaran makna pentingnya suatu kemandirian.

2) Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan kapasitas usaha merupakan upaya dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, ketrampilan untuk dapat meningkatkan kualitas pribadi dan usahanya dalam meningkatkan mutu produktivitas selama melaksanakan pekerjaannya (Mardikanto, 2010b). Dalam pengembangan kapasitas usaha, maka secara langsung akan terkait dengan jejaring kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak (Mardikanto, 2010b).

Secara analogi, contoh kaitannya dengan pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik adalah: (1) adanya peningkatan nilai tambah produk pertanian, (2) peningkatan produksi pertaniannya, (3) pengurangan ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia serta (4) peningkatan pendapatan petani. Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan pengembangan kapasitas usaha dalam bentuk: (1) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, (2) peningkatan motivasi kerja, (3) pengembangan jejaring kemitraan, (4) pendampingan (Mardikanto, 2010b).

Untuk dapat mendorong seseorang menjadi sadar dan termotivasi mengembangkan kapasitas usahanya, maka dalam prinsip pengembangan masyarakat perlu adanya penghargaan kepada kapasitas lokal (Ife *et al* (2008). Penghargaan tersebut terkait dengan perolehan sejumlah uang dan suasana yang memungkinkan berlangsung suatu proses dengan nyaman dan efektif (Sutrisno, 2010).

Suasana yang nyaman, dapat dibangun dengan adanya peningkatan dan penguatan: (1) komunikasi, (2) partisipasi, (3) kepercayaan antar pribadi, (4) ruang umpan balik yang berkesinambungan (Sutrisno, 2010). Kondisi tersebut dapat tercipta dengan baik dan berkelanjutan jika didukung oleh gaya kepemimpinan yang selalu membangkitkan kepercayaan kepada pengurus dan anggota sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sesuai di lingkungan tersebut (Sutrisno, 2010).

Menurut Wanandi (1993) dalam pengembangan kapasitas usaha, diperlukan adanya institusi-institusi usaha baru yang digalang secara bersama-sama. Kunci untuk menyelesaikan masalah kualitas sumber daya manusia adalah perlunya diciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi perkembangan diri manusia.

Dalam hal ini, maka campur tangan pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif sangat diperlukan (Wanandi, 1993). Namun demikian, campur tangan tersebut tidak sampai menimbulkan penindasan struktural atau wacana baru dan perlu memperhatikan keanekaragaman (Ife *et al.*, 2008).

Sejalan dengan itu, Caudron (1995) dalam Sutrisno (2010) dan Ife *et al* (2008) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan motivasi usaha bersama di dalam organisasi, diperlukan adanya forum: (1) *sharing* gagasan dan informasi, (2) pelatihan sumber daya manusia, (3) dorongan agar individu petani untuk meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Oleh karenanya, secara analogi dalam pemberdayaan petani perlu adanya upaya mengoptimalkan fungsi kelompok tani sebagai unit kerjasama dan usaha ekonomi bersama.

3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan kapasitas kelembagaan, merupakan upaya dan atau kegiatan yang mendorong kepada terjadinya pengulangan kegiatan dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik, sehingga berubah menjadi kegiatan rutinitas. Hayami dan Kikuchi (1981) dalam Mardikanto (2010b) memaknai institusi sebagai perangkat

umum yang ditaati atau disepakati dan dipelihara oleh anggota masyarakatnya. Contoh, disebutkan oleh Best (2009) bahwa makna dari alih teknologi pertanian organik di Jerman Barat adalah kegiatan keseharian petani dalam mengontrol dan menggunakan berbagai asupan organik sebagai pengganti asupan kimia.

Oleh karenanya, apapun bentuknya yang disebut kelembagaan perlu didukung oleh komponen: (1) keterlibatan orang di dalamnya, (2) kesepakatan atau kepentingan yang akan diraih, (3) aturan main yang ditaati dan (4) struktur yang jelas (Mardikanto, 2010b). Dalam hal ini, pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi: (1) kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, (2) kejelasan strategi yang akan ditempuh, (3) interaksi antar individu, (6) interaksi dengan pemangku kepentingan eksternal (Mardikanto, 2010b).

Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, dapat dilakukan melalui kegiatan: (1) peningkatan daya adaptasi, (2) peningkatan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, (3) pemberdayaan sumber daya manusia, (4) kejelasan aturan main di kelembagaan petani, (5) pengembangan kemitraan usaha, (6) peningkatan daya saing produk lokal (*market local leader*) di tingkat lokal, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing lokal dan (7) berpihak kepada petani (Zakaria, 2006).

Makna lain dalam pengembangan kapasitas kelembagaan adalah berfungsinya: (1) unit belajar, (2) unit bekerja sama dan (3) unit produksi dan kerjasama kemitraan. Untuk mendorong peningkatan ke tiga fungsi tersebut, menurut Sutrisno (2010) peran pemerintah dalam penciptaan suasana yang dapat mendukung terjadinya partisipasi dan munculnya inisiatif dari masing-masing kelembagaan petani tetap sangat diperlukan.

Hal ini terbukti bahwa di: (1) wilayah Eropa (Acs *et al.*, 2005), (2) wilayah tanah lempung di Belanda (Acs *et al.*, 2009), (3) Denmark dan Inggris (Daugbjerg *et al.*, 2011), (4) Republik Chehnya (Mala *et al.*, 2013) peran kebijakan pemerintah

tentang sistem pertanian organik telah mampu mendorong petani secara bertahap melaksanakan alih teknologi pertanian organik.

4) Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pengembangan kapasitas lingkungan, merupakan kegiatan yang berujung pada pengembangan sikap dan perilaku petani terhadap: (1) pentingnya memahami dampak negatif dari penggunaan pupuk dan kimia bagi tanah, tanaman dan makhluk hidup lainnya, (2) pentingnya memahami perlunya mengurangi penggunaan pestisida kimia dan memperbanyak penggunaan pupuk dan pestisida organik, (3) pentingnya memahami dan peduli kepada keberlanjutan sumberdaya lingkungan.

Kesadaran tersebut merupakan manifestasi dari rasa kepeduliannya terhadap diri sendiri dan masa depan bagi anak cucu serta sumber daya lingkungan. Rasa kepedulian kepada lingkungan hidup diwujudkan dengan cara mengubah pandangan yang semula memisahkan pengertian sumber daya alam terhadap lingkungan hidup, menjadi satu kesatuan utuh dalam pengertian ekosistem (Salim, 1993).

f. Agen (Aktor) Pemberdaya Masyarakat

Agen adalah aktor yang dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan tertentu dan berharap orang lain akan melakukan hal yang sama terhadap kebutuhan mereka sendiri (Giddens, 2010). Dalam hal ini, yang dimaksud aktor pemberdaya adalah kelompok tani Rukun Makaryo. Oleh karenanya, dinamika⁸ kelompok tani yang terjadi di kelompok tani Rukun Makaryo secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan kelompok tani dalam melaksanakan pemberdayaan petani dalam alih teknologi.

Adapun unsur-unsur kelompok tani yang mempengaruhi keberhasilan kelompok tani Rukun Makaryo dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan petani

⁸ Dinamika kelompok adalah hubungan interaksi dan interdependensi antara anggota pembentuk kelompok tani, secara keseluruhan sehingga kelompok tani tersebut dapat mewujudkan cita-citanya (Soekanto, 1982 dan Santoso, 2009).

dalam alih teknologi pertanian organik adalah: (1) kepemimpinan kelompok, (2) tujuan kelompok, (3) peran anggota kelompok, (4) suasana dalam kelompok, (5) kekompakan anggota, (6) *self efficacy*, (7) daya tarik kelompok (Soekanto, 1982; Hariadi, 2011).

Memperhatikan hal tersebut, maka jika suatu Agen pemberdaya (kelompok tani) ingin menjalankan fungsinya dengan baik, maka kuncinya pada upaya mengoptimalkan unsur-unsur dinamika kelompok tani. Artinya, peran pimpinan (*leader*) atau ketua kelompok tani menjadi sangat penting. Oleh karenanya, aktor pemberdaya (ketua kelompok tani) dituntut memiliki kelebihan dalam: (1) pengetahuan dan ketrampilan, (2) sikap, (3) kemampuan, (4) semangat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan (5) dapat mendorong atau menciptakan suasana yang memungkinkan penerima manfaat dalam mewujudkannya (Soetomo, 2009).

Ragam peran aktor pemberdaya adalah sebagai: (1) pendamping, (2) fasilitator, (3) motivator, (4) desiminotor (Karsidi, 2002; Giddens, 2010). Sedangkan Mardikanto (2009), lebih menekankan sebagai: (1) edukator, (2) desiminotor, (3) fasilitator, (4) konsultan, (5) supervisi (pendamping), (6) pemantauan dan (7) evaluator dan (8) jembatan penghubung. Oleh karenanya, sebagai aktor pemberdaya, diharapkan mampu menempatkan diri secara tepat dan dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan tersebut (Mardikanto, 2009).

g. Penerima Manfaat

Sasaran atau penerima manfaat dalam penelitian ini adalah petani, sebab petani adalah pelaku utama dalam menggarap sawah. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan (UU No 16 Tahun 2006⁹, Permentan No 82 tahun 2013¹⁰).

Menurut Soedarmanto (2003) petani sebagai pribadi mempunyai harga diri, perasaan, cita-cita, kepercayaan, keyakinan, kemampuan di dalam dirinya, kehendak untuk dihargai dan diakui keberadaannya, sehingga dalam komunitas sosial membentuk subkultur tersendiri. Keunikan subkultur petani (*peasants*) adalah: 1) tidak mudah percaya kepada orang lain, 2) membenci kekuasaan pemerintah, 3) tidak inovatif, 4) kurang kritis (Dixon, 1982 dalam Soedarmanto, 2003). Oleh karenanya, sebagian besar petani memiliki prinsip *dahulukan selamat* (Scott., 1981).

Kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi tanah sawah dan meningkatkan kesehatan produk yang dihasilkan bukan saja terbatas kepada individu petani. Namun juga bagi para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Kesadaran tersebut sangat penting, sebab salah satu peran mereka adalah sebagai konsumen dari produk pertanian.

h. Faktor Pendukung.

Peran dari faktor pendukung, bukan saja terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana produksi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan ketrampilan serta sebagai pengembangan jejaring pasar atau konsumen. Dengan kata lain, berbagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan masyarakat (petani).

Berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan pemangku kebijakan dan atau pemangku kepentingan dapat menciptakan suatu iklim atau suasana yang memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan masyarakat (petani).

⁹ Undang-Undang RI No 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian No 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Peran pemerintah dan pemangku kepentingan di: (1) Jepang (Herawati, A.R dan Deny Junanto, 2003), (2) Eropa (Acs *et al.*, 2005), (3) di Kabupaten Badia, Kecamatan Bani Kinana dan Ajloun (Yordania Bagian Utara) (Rouson, 2007) dan di Katalonia (Spanyol) (Kallas *et al.*, 2009), (4) Belanda (Acs *et al.*, 2009), (5) Denmark dan Inggris (Daugbjerg *et al.* (2011), (7) Republik Chehnya (Mala, 2013), telah berhasil menciptakan suatu suasana yang memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan petani dalam melakukan konversi sistem pertanian konvensional kepada organik.

Proses pemberdayaan masyarakat di: (1) Nigeria (Faturoti *et al.*, 2006), (2) Belanda (Acs *et al.*, 2009), (3) Jerman Barat (Best, 2009), (4) wilayah Saskatchewan Kanada (Khaledi *et al.*, 2010), (5) wilayah Macedonia bagian tengah (Oxouzi, E dan Papanagiotou. E., 2010), dapat terjadi dan berkembang karena didukung oleh adanya kepastian pasar. Bahkan di masyarakat modern pun (di OHIO, AS) keberadaan demplot sistem pertanian organik menjadi sumber motivasi dalam proses alih teknologi pertanian organik bagi petani setempat (Wiegel, 2010).

Berikut ini disajikan contoh kegagalan upaya alih teknologi pertanian organik terjadi di: (1) di wilayah Oyo Nigeria karena tidak tersedianya pasar, sumber informasi dan tidak adanya petani di sekitarnya yang melaksanakan sistem pertanian organik (Ajewole, 2010), (2) di wilayah Babol Iran, karena kurangnya dukungan dari pemerintah (Sharifi *et al.*, 2010), (3) di Propinsi Khon Kaen (Thailand bagian Timur Laut) karena rumitnya cara membuat kompos jerami dan tidak tersedianya modal usahatani (Supaporn *et al.*, 2013). Memperhatikan hal tersebut, semakin jelas bahwa proses pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu agen pemberdaya, melainkan perlu adanya keterlibatan agen pendukung lainnya.

i. Strategi pemberdayaan Petani

Menurut Pruitt, D.G dan Jeffrey Z. Rubin (2009), penggunaan istilah strategi memiliki sejumlah tujuan. Strategi merupakan alternatif pilihan terbaik untuk

mencapai atau mewujudkan sasaran yang dituju (Siagian, 2008). Strategi juga diartikan sebagai hasil analisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Rangkuti, 2011).

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat 2 (dua) unsur utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu: (1) pemberian kekuasaan dan (2) pengembangan kapasitas kepada penerima manfaat. Dalam pengembangan kapasitas, pada dasarnya terkait dengan strategi pembelajaran. Menurut Uno (2009) strategi dalam pembelajaran orang dewasa mencakup 4 (empat) komponen yaitu: (1) urutan kegiatan yang diperlukan, (2) metode, (3) media dan (4) waktu.

Adapun pelaksanaannya dapat melalui proses: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran, (4) kemudahan akses terhadap: ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi serta penguatan kelembagaan petani (UU RI No 19 Tahun 2013).

Berikut disajikan contoh ragam strategi dalam proses pemberdayaan petani: (1) menggunakan tahapan transfer teknologi (Rogers, E.M dan F. Floyd Shoemaker (1971)¹¹, (2) mengubah pendekatan (Karsidi, 2002)¹², (3) obyek sasaran individu maupun kelompok (Ife *et al.*, 2002; Neri *et al.*, 2011; Alsop, R dan Nina Heinsohn (2005), (4) partisipasi (Mikkelsen, 2003; Herawati, A.R dan Deny Junanto, 2003), (5) penggunaan 5 (lima) P¹³ (Suharto, 2005), (6) memunculkan inisiatif lokal dan *selfhelp* (Lyon 1987 dalam Soetomo, 2008).

¹¹ Tahapan transfer teknologi meliputi: (1) penyadaran, (2) penumbuhan minat, (3) penilaian, (4) percobaan, (5) melaksanakan alih teknologi secara lebih serius (Rogers, E.M dan F. Floyd Shoemaker, 1971).

¹² mengubah pendekatan administrasi dengan: (1) kelembagaan, (2) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, (3) peningkatan komitmen, (4) peningkatan kepemimpinan lokal dan (5) penguatan jaringan (Karsidi, 2002).

¹³ Pendekatan 5 P: (1) Pemungkinan yaitu penciptaan suasana yang memungkinkan terjadinya peningkatan potensi penerima manfaat; (2) Penguatan yaitu peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang diperlukan; (3) Perlindungan yaitu melindungi atau kepemilikan kepada yang lemah; (4) Penyokongan yaitu pendampingan dan bimbingan

Jika dicermati lebih seksama, istilah pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas dalam batasan pemberdayaan masyarakat (petani) tersebut dapat dimaknai atau ditafsirkan adanya peran dari pihak eksternal petani (penerima manfaat atau pesan) dalam mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan agensi (aktor). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat (petani) ini, dapat dimaknai bahwa masyarakat (petani) yang perlu diberdayakan, tidak selalu dalam kondisi tidak berdaya. Oleh karenanya, dikembangkan berbagai alternatif strategi sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat (petani) yang menolak untuk melakukan untuk melakukan perubahan perilaku atau keyakinan bukan disebabkan oleh: (1) ketidak mengertian (tidak tau), (2) ketidak mampuan, (3) tetapi karena adanya alasan pribadi, sehingga yang bersangkutan memutuskan tidak bersedia melakukan perubahan perilaku. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat (petani) ini dapat dimaknai dengan arti kata: (1) bukan karena petani tidak mengetahui, (2) bukan karena petani tidak mampu, tetapi (3) karena memang petani tidak mau melakukan perubahan perilaku. Memperhatikan hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah persuasif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

j. Komunikasi persuasif

Menurut Mulyana (2007) dan Mardikanto (1998) dalam mewujudkan perubahan perilaku sosial di suatu masyarakat, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan komunikasi yaitu: (1) pendekatan informatif, (2) pendekatan intertainment dan (3) pendekatan persuasif. Pendekatan informatif, memfokuskan pada upaya mempengaruhi orang lain dengan memberikan informasi kognitif dan psikomotorik tertentu agar yang bersangkutan mau melakukan perubahan perilaku. Pendekatan intertainment, dilaksanakan dengan cara menghibur. Adapun pendekatan

agar penerima manfaat mampu menjalankan peranya; (5) Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan peran, ehingga memungkinkan terjadinya proses yang dituju secara bersama-sama(Suharto, 2005) .

persuasif dilakukan dengan cara menggugah sikap dan perasaannya agar dengan sukarela mau melakukan perubahan perilaku.

Istilah persuasif (bujukan) oleh Soedarmanto (2003) dimaknai sebagai tindakan untuk membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa informasi yang disampaikan akan memberi manfaat bagi dirinya. Hal senada, dikemukakan Mulyana (2007) yaitu sebagai tindakan untuk meyakinkan bahwa fakta atau informasi yang disampaikan benar-benar layak diketahui. Adapun Berger *et al* (2015) memaknainya sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu dengan tujuan untuk mengubah keyakinan atau perilaku orang lain.

Dalam rangka membujuk, mengajak orang lain untuk meyakini fakta atau pesan yang disampaikan, maka komunikator perlu memiliki kemampuan dalam menciptakan: (1) suasana yang santai, tidak ada perasaan terpaksa, (2) mampu menggunakan berbagai media komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi penerima pesan (Mardikanto, 1998). Menurut Dilar dan Marshall, 2003 dalam Berger *et al* (2015) kemampuan untuk mengubah pandangan orang lain tersebut merupakan ketrampilan paling mendasar yang perlu dimiliki oleh komunikator.

Adapun beberapa alternatif teknik yang digunakan dalam membujuk atau mengajak orang lain mengubah perilakunya adalah: (1) asosiasi¹⁴, (2) integrasi¹⁵, (3) ganjaran, (4) tataan (*icing*)¹⁶, (5) *red-hearring*¹⁷ (Etriana, 2013). Agar teknik-teknik tersebut menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong orang lain agar secara sukarela mau mengubah perilakunya, maka perlu disesuaikan dengan kebutuhannya.

¹⁴ Teknik Asosiasi adalah menyandingkan topik pembicaraan dengan issue-issue yang sedang dibicarakan masyarakat.

¹⁵ Teknik Integrasi adalah mengarahkan kepada kondisi atau keadaan senasip sepenanggungan.

¹⁶ Teknik *Icing* adalah seni menata pesan dengan himbauan emosional, sehingga penerima pesan menjadi tertarik.

¹⁷ Teknik *red-herring* nama ikan di Samudra Atlantik yang digunakan sebagai simbol meraih kemenangan dalam berdebat dengan mengelakkan argumentasi yang lemah menjadi sesuatu yang dikuasai.

Sebagaimana disebutkan oleh Turner (2006) bahwa sejak jaman pra revolusi industri di Eropa, para petani (individu / kelompok) memiliki kemampuan untuk berdaya dan mandiri jika diberi akses untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi. Pada saat itu, semua akses sarana dan prasarana produksi dikuasai oleh para kaum Borjuis yang meyakini bahwa gereja sebagai ideologi negara. Petani disubordinatkan dengan cara memisahkan dengan alat produksinya. Petani masih memiliki sedikit independensi dari para tuan tanah dalam menggarap sawah, tetapi tetap dikendalikan dan dibiarkan dalam posisi subsisten.

Terjadinya kegagalan proyek bangun desa di Kabupaten Gunungkidul dan eks Proyek Pertanian Lahan Kering di DAS Jratunseluna tentang program konservasi lahan kering dengan pendekatan fisik dan vegetatif yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani setempat. Terbukti, ketika program sudah selesai, maka tidak ada keberlanjutan dari kegiatan masyarakat setempat terhadap program tersebut (Pranaji, 2006). Hal senada, protes yang dilakukan oleh masyarakat miskin di suatu dusun di Gunungkidul terhadap orang-orang LIPI yang berupaya mengganti pohon jati dengan pepaya dilakukan dengan cara diam (Wahono, *et al.*, 2005).

Menghadapi kondisi ini, maka untuk memberdayakan masyarakat tersebut Gerakan Cindelas¹⁸ hanya melakukan: (1) melihat, (2) mendengarkan, (3) berdialog, dan (4) membiarkan mereka bertindak menurut cara mereka. Melalui tindakan tersebut, akhirnya masyarakat menjadi terbuka bagi Gerakan Cindelas. Secara analogi, komunikasi persuasif ini, sering digunakan para Dokter untuk mempengaruhi pasien atau keluarganya agar mampu berpikiran positif dan melakukan sesuatu (Dubov, 2015 dan Rubinelli, 2013).

Bahkan secara tegas dikemukakan oleh: [Timprasert, *et al* (2014), Mickael (2014), Zhu dan Hildebrandt (2013)] bahwa komunikasi persuasif sangat efektif digunakan untuk mengubah perilaku seseorang. Untuk mengubah perilaku seseorang

¹⁸ Cindelas adalah nama suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang alamat di Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

tersebut menurut Brinol, *et al* (2015), Teng, *et al* (2015), Mayer, *et al* (2014), Floyd (2010), Sattler dan Nagel (2010), Mininni (2010) akan lebih mudah jika sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kebutuhan tersebut, menurut Wolf (1985) dalam Hasanuddin (2005) dapat berbeda-beda sesuai dengan relung ekologisnya.

k. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur dengan cara matematis atau dengan menggunakan pembatasan waktu dan dana. Oleh karenanya, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran komunitas.

Tanda-tanda telah terjadinya kesadaran komunitas dalam alih teknologi pertanian organik adalah: (1) masyarakat menjadi nyaman, (2) peningkatan motivasi membantu diri sendiri, (3) peningkatan kepercayaan diri dan (4) terbentuknya komitmen (Liffman, 1978 dalam Ife *et al.*, 2008). Menurut Mardikanto (2009 dan 2010b) indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditandai: (1) adanya peningkatan jumlah masyarakat yang tertarik dengan kegiatan tersebut, (2) peningkatan frekuensi kehadiran, (3) kemudahan dalam memperoleh persetujuan adanya ide baru, (4) jumlah dan jenis ide yang diusulkan (Hikmat, 2001), (5) meningkatnya kemandirian masyarakat. Adapun menurut Syahyuti (2006), masyarakat yang berdaya ditandai oleh adanya kepemilikan kebebasan dalam membuat pilihan dan tindakan sendiri.

2. Sistem Pertanian Organik

a. Pengertian pertanian organik

Sistem pertanian organik adalah Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan,

dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem (Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik; SNI 6729:2013 Tentang Sistem Pertanian Organik).

Adapun menurut Alimoeso (2009) dalam Cahyani (2010) yang dimaksud dengan sistem pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistic dan terpadu yang menerapkan praktek-praktek manajemen yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekosistem secara alami, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas yang berkelanjutan.

Hal senada disebutkan oleh Rigby dan D. Caseres (2001) dan Hairiah (2002) bahwa pertanian organik adalah sistem pertanian yang menggunakan sisa-sisa atau hasil rombakan berbagai biomasa. Adapun sumbernya dari (1) sisa-sisa atau hasil rombakan berbagai biomasa, (2) kombinasi berbagai jenis tanaman penghasil pupuk hijau (Rigby, D dan D. Caseres, 2001); Hairiah, 2002; Aryantha, 2002; Salikin, 2003; Olabiyi *et al.*, 2010; Sadati *et al.*, 2010).

Dalam sistem pertanian organik mengandung makna penggunaan makro dan mikroba tanah yang diyakini dapat menciptakan sendiri kondisi atau keseimbangan ekologi di dalam tanah (Padel, 2001 dalam Kummer, 2001). Oleh karenanya, para ilmuwan ekologi sepakat bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kegagalan pertanian industrial (Salikin, 2003).

Manfaat bahan organik adalah: (1) melindungi dan melestarikan keragaman organisme di dalam tanah serta fungsinya, (2) meningkatkan kualitas fisik, kimia dan biologi tanah, (3) mengurangi terjadinya pencemaran residu yang bersifat racun, (4) meningkatkan kesehatan masyarakat, (5) mengurangi biaya produksi, (6) mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida kimia (Hardjowigeno, 1987; Sutanto. 2002; Aryantha, 2002; Atmojo, 2003); Iqbal, 2008).

Adapun kelemahannya, jika bahan organik belum memiliki kematangan yang cukup dan didukung kondisi aerasi tidak baik akan bersifat toksit dan dapat menjadi inang hama dan penyakit (Hanafiah *et al.*, 2005). Kelemahan lain: (1) diperlukan dalam jumlah yang banyak, (2) bersifat ruah, (3) dapat menimbulkan kekahatan¹⁹ unsur hara jika belum cukup matang (Iqbal, 2008). Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan fungsi bahan organik sebagai pembenah tanah, maka langkah yang bijaksana perlu mengurangi penggunaan senyawa-senyawa *sida* (Aryantha, 2002).

b. Pengertian alih teknologi pertanian organik

Teknologi dapat diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis (Redaksi, 2002). Adapun UU RI No 18²⁰ tahun 2002 pasal 1 ayat 1 mengartikan teknologi sebagai: (1) cara, (2) metode, (3) proses yang menghasilkan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Teknologi bukan saja sebagai alat atau benda, tetapi mencakup keseluruhan: (1) ide-ide, (2) metode, (3) teknik dan (4) segala upaya atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Zakaria, 2008).

Adapun alih teknologi pertanian organik atau konversi pertanian organik adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh petani yang semula menggunakan sistem pertanian konvensional kemudian beralih menggunakan sistem pertanian organik (Koesling, 2008). Dalam hal ini, menurut Best (2009) kunci pokoknya adalah pada kegiatan keseharian yang dilakukan oleh petani.

Dalam prakteknya, proses konversi tersebut dilakukan secara bertahap. Sebagaimana terjadi di wilayah: (1) wilayah Eropa, (2) Spanyol bagian selatan, (3) Belanda, (4) Macedonia, (5) Denmark dan Inggris, (6) Republik Chehnya melakukan

¹⁹ Kekahatan artinya kekurangan terhadap unsur hara tertentu (Redaksi, 2002).

²⁰ UU RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Diundangkan pada Tanggal 29 Juli 2002. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84. <http://www.litbang.bantenprov.go.id> /diunduh pada tanggal 27 Mei 2010.

secara bertahap [Padel (2001) dan Acs *et al* (2005); Lopez *et al* (2007); Acs *et al* (2009); Oxouzi, E dan Papanagiotou. E (2010); Daugbejerg *et al* (2011); Mala *et al* (2013)].

Kondisi tersebut, sejalan dengan prinsip petani *dahulukan selamat* sebagaimana yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara (Scott, 1981). Dalam prinsip tersebut, petani tidak sama sekali mengesampingkan inovasi teknologi yang ditawarkan kepadanya, tetapi lebih didasarkan kepada insentif yang akan diperoleh dari alih teknologi tersebut. Oleh karenanya, kepastian pasar menjadi kunci keberhasilan dalam proses alih teknologi pertanian organik [Acs *et al* (2005); Kohomoto (2005); Best (2009); Acs *et al* (2009); Oxouzi, E dan Papanagiotou. E (2010); Khaledi *et al* (2010)]. Berikut ini disajikan beberapa alasan petani di beberapa negara dalam melakukan alih teknologi pertanian organik:

Alasan utama petani di Norwegia dalam menggunakan sistem pertanian organik adalah: (1) kesehatan pangan, (2) keuntungan lingkungan, (3) adanya permintaan pasar, (4) adanya kebijakan dari pemerintah, (5) adanya kesadaran petani tentang isu lingkungan hidup (Koesling *et al.*, 2008). Adapun bagi petani di Xinjiang China dan di wilayah Tigray Ethiopia Bagian Utara karena: (1) penggunaan lahan berkelanjutan, (2) meningkatkan kualitas hasil, (3) setelah 6 tahun, hasilnya dapat melebihi sistem pertanian konvensional (Jun *et al.*, 2010; Sue Edwards, 2010 dalam IFOAM, 2010).

Sementara itu, petani di wilayah Oyo di Nigeria tertarik melaksanakan sistem pertanian organik karena: (1) ketersediaan tenaga kerja di dalam rumah tangga, (2) sering bertemu dengan penyuluh, (3) pengalaman bertani sebelumnya (Ajewole, O.C 2010). Adapun bagi petani di wilayah Chimaltenango, Guatemala karena: (1) didukung tokoh masyarakat setempat, (2) memiliki jejaring mitra (Oleas *et al* (2010) dan bagi petani di Thailand bagian Utara karena: (1) memiliki jejaring mitra, (2) memperoleh dukungan dari mitra kerja, (3) untuk kesehatan diri sendiri, (4) menghasilkan bibit yang berkualitas, (5) biaya produksi semakin menurun, (6) meningkatkan kesuburan tanah (Jierwiryapant *et al* 2012),

Begitu pula, petani di wilayah di Nigeria bagian Barat Daya dalam melaksanakan sistem pertanian organik karena: (1) dukungan kebijakan dari pemerintah, (2) kedekatan dengan lahan garapan, (3) adanya petani yang menggunakan sistem pertanian organik (Adebayo, S.A dan Idowu Oladele, O. 2013a). Adapun alasan petani di wilayah Negeria Barat Daya adalah: (1) adanya sosialisasi atau diskusi yang terus menerus, (2) adanya kontak dengan petani secara terus menerus (Adebayo, S.A dan Idowu Oladele, O. 2013b).

Sementara itu, bagi petani yang: (1) kurang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tentang pertanian organik, (2) tidak ada kepastian pasar serta (3) tidak adanya contoh hamparan lahan organik telah menjadi penghalang. Sebagaimana disebutkan Ajewole *et al* (2010), bahwa penolakan petani di wilayah Oyo Nigeria dalam melaksanakan sistem pertanian organik karena: (1) tidak tersedianya pasar di sekitar tempat tinggalnya, (2) tidak tersedianya informasi yang memadai, (3) tidak memiliki tenaga kerja.

Penolakan petani dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik sangat kuat dirasakan di wilayah Babol Iran karena pertimbangan: (1) penurunan hasil, (2) kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, (3) kurang adanya dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah, (4) kurang memiliki modal usaha (Sharifi *et al.*, 2010). Begitu pula penolakan petani di Thailand bagian Utara karena selama ini tidak pernah memperoleh pelatihan (Jierwiryapant *et al.*, 2012).

Adapun penolakan bagi petani di Propinsi Khon Kaen (Thailand bagian Timur Laut) karena: (1) rumitnya cara pembuatan kompos jerami, (2) kurangnya ketersediaan tenaga yang mengerjakan dan (3) biaya untuk membuat kompos mahal (Supaporn *et al.*, 2013). Adapun penolakan petani di wilayah di Nigeria bagian Barat Laut dalam melaksanakan sistem pertanian organik karena: (1) di sekitarnya tidak ada yang melaksanakan (Adebayo, S.A dan Idowu Oladele, O. 2013a).

c. Pengertian Kemandirian Petani Dalam Alih Teknologi Pertanian Organik

Mandiri menurut artinya adalah: (1) dapat berdiri sendiri, (2) tidak bergantung pada orang lain (Redaksi, 2002). Menurut arti kata tersebut, maka mandiri dapat dimaknai sebagai adanya kemauan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu, baik secara sendiri dan atau dengan melaksanakan kerjasama kemitraan dalam mewujudkan harapan yang diinginkan.

Adapun menurut Nawawi dan Martini (1994) dalam Sumardjo (1999) yang dimaksud kemandirian adalah *autonomy* dan bukan sebagai individualisme. Dalam pengertian *moral autonomy*, kemandirian dimaknai sebagai kehendak yang didasarkan pada prinsip: (1) keyakinan diri, dan (2) bertindak bebas tanpa adanya ketergantungan dari orang lain (Sumardjo, 1999).

Memperhatikan pengertian tersebut, maka yang dimaksud kemandirian petani dalam alih teknologi pertanian organik adalah adanya kemauan dari dalam diri petani untuk secara sukarela melaksanakan alih teknologi pertanian organik secara berkelanjutan. Makna dari pengertian tersebut adalah: (1) adanya kesadaran pribadi, (2) adanya kemauan untuk melaksanakan secara terus menerus, dan (3) adanya keberanian untuk menjalin hubungan kemitraan dengan petani lain.

d. Indikator Tercapainya Kemandirian Petani Dalam Alih Teknologi Pertanian Organik

Menurut Feuerstein (1988) dalam Mikkelsen (2003), sampai saat ini tidak ada prosedur standar untuk mengukur kehidupan nyata. Oleh karenanya, untuk menunjukkan indikator kemandirian petani, atau setidaknya adanya upaya dalam mewujudkan kemandiriannya dalam alih teknologi pertanian organik, maka berikut ini disajikan beberapa petunjuk yang dapat dengan mudah dijumpai di lapangan.

Indikator kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kemandiriannya yaitu: (1) percaya diri dalam mengambil keputusan, (2) berinisiatif dan bekerja keras, (3) berani mengambil resiko, (4) mampu bekerja sama untuk memperbaiki kondisi tanah, tanaman dan hasilnya, (5) selalu menambah pengetahuan dan ketrampilannya (Edward, 1967 dalam Sumardjo, 1999 dan Slamet (1995) dalam Karsidi, 1999), (6) potensi individu menjadi sebuah perubahan komunitas, (7) dapat mengontrol struktur eksternal (Parson *et al.*, 1994 dalam Suharto, 2005), (8) adanya peningkatan akses ke lembaga keuangan, (9) terjaminnya pasar produk pertanian (Nuhung, 2006), (10) meningkatnya partisipasi masyarakat (Mardikanto, 2009) (11) jika sedikitnya terdapat 2% dari anggotanya yang mempunyai integritas dalam mewujudkan kemandiriannya maka di wilayah tersebut akan sejahtera (Ciputra, 2009).

Memperhatikan hal tersebut, maka secara analogi indikator dalam mewujudkan kemandirian petani dalam alih teknologi pertanian organik adalah: (1) percaya diri dalam pengambilan keputusan pemanfaatan saprodi organik lokal, (2) berani menghadapi resiko atas penggunaan teknologinya sendiri, (3) memiliki prakarsa dan bertindak atas kekuatan sendiri, (4) menghasilkan panen padi perlakuan organik secara berkelanjutan, (5) menjadikannya sebagai kegiatan keseharian, (6) mampu bekerja sama dengan orang lain yang memiliki tujuan sama.

e. Kondisi Sistem Pertanian Organik Dimasa Depan

Atas dasar kemanfaatannya, maka IFOAM dalam Beban (2008) pada tahun 2005 telah mencanangkan 4 (empat) prinsip pertanian organik yang diharapkan menjadi panduan sistem pertanian organik di masa depan yaitu harus mengedepankan pada: (1) *health*, (2) *ecology*, (3) *fairness* dan (4) *care*. Adapun kriteria dalam sistem pertanian organik adalah: (1) harus menjaga dari terjadinya kontaminasi, (2) tidak menggunakan pestisida sintetis, (3) mencegah terjadinya pencemaran tanah, (4) menjaga kualitas hasilnya, (5) tidak menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Adapun Hairiah (2002) menambahkan dua prinsip yaitu: (1) *commit to user*

penggunaan limbah organik C/N tertentu²¹, (2) kandungan logam berat²² di bawah ambang batas.

Hal senada disebutkan oleh Reijntjes *et al* (1992) bahwa pertanian organik yang diharapkan di masa depan yaitu: (1) terjaminnya kondisi tanah, (2) terjadinya siklus yang seimbang antara *input* dan *output* unsur hara, (3) tercukupinya kebutuhan air bagi tanaman dan iklim mikro yang sesuai, (4) terjadi peningkatan kesehatan tanaman di atasnya, (5) terjadinya keseimbangan siklus energi dan keterpaduan hubungan antara: tanaman, tanah, biota tanah serta keseimbangan keanekaragaman sumberdaya genetik yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman.

Adapun arah pertanian Indonesia tahun 2013-2045 yang: bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur khususnya dalam hal:

- (1) pada tataran kebijakan, pertanian mandiri berarti bahwa pembangunan pertanian haruslah diarahkan untuk mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan pangan dan kedaulatan pertanian,
- (2) pada tataran petani dan usahatannya, pertanian mandiri berarti bahwa petani Indonesia memiliki kemerdekaan dan kedaulatan dalam mengelola usahatannya,
- (3) pada tataran kinerja sektoral, pertanian mandiri berarti mampu mewujudkan kemandirian pangan, kemandirian industri berbasis pertanian dan sumberdaya domestik, serta kemandirian energi berbasis hayati.

Ketiga hal ini termasuk dalam pilar kemandirian dan penghidupan bangsa sehingga mesti dijadikan sebagai arah pembangunan pertanian (Kementerian Pertanian, 2013). Sebagaimana disebutkan oleh Ife *et al* (2002) bahwa penguatan komunitas kemandirian masyarakat dan jejaring sebagai dasar pengorganisasian dan

²¹ Standard C/N Ratio pupuk padat yaitu: Internasional ($x \leq 20$); Departemen Pertanian RI (12-15) Simamora *et al* (2008) dan Hadisuwito (2008).

²² Kandungan logam berat yang dimaksud yaitu: (Pb, Cd, Zn dan Cu).

pengembangan struktur sosial dan ekonomi alternatif harus menjadi sebuah visi yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Struktural Fungsional

Dalam teori struktural fungsional Parsons, masyarakat dimaknai sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari subsistem sosial yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan terintegrasi sebagaimana dalam sistem organisme hidup (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007; Jones, 2009). Dalam teori tersebut, Parsons juga memusatkan perhatiannya kepada status peran aktor komponen sistem sosial dalam skala yang luas seperti: kolektivitas, norma dan nilai dalam kaitannya dengan pranata sosial (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007).

Agar sistem sosial tersebut secara struktural fungsional dapat berjalan sesuai normatifnya, maka diperlukan 7 (tujuh) asumsi dasar yaitu: (1) harus terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat berinteraksi dengan sistem sosial lainnya secara harmonis, (2) untuk dapat berperan secara harmonis, maka diperlukan dukungan dari sistem sosial yang lain, (3) harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam porsi yang proporsional, (4) harus mampu mendorong terjadinya partisipasi yang memadai dari anggotanya, (5) harus mampu mengendalikan perilaku anggota yang berpotensi mengganggu, (6) harus ada mekanisme untuk mengendalikan potensi terjadinya konflik di dalam sistem sosial, dan (7) harus memiliki media komunikasi yang mudah dipahami dan dipelihara oleh anggotanya yang dapat menjamin kelangsungan hidup sistem sosial tersebut (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007).

Atas dasar tersebut, dapat dipahami bahwa semua anggota sistem sosial secara langsung atau tidak langsung berperan menjadi aktor untuk mewujudkan tujuannya (Susilo, 2008). Artinya, dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan maka semua aktor secara normatif tidak akan berhenti mengupayakannya sampai terwujudnya tujuannya yang ingin dicapai. Oleh karenanya, dalam mewujudkan tujuan yang

diinginkan, individu aktor pemberdaya tidak dapat bertindak sendirian (Ife *et al.*, 2002 dan Mardikanto, 2010b). Hal ini disebabkan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat seperangkat norma, ide dan kondisi situasional yang mempengaruhinya (Susilo, 2008).

Kekuatan teori struktural fungsional Parsons ini terletak pada kemampuannya dalam melukiskan hubungan antar struktur sistem sosial dalam skala luas dengan pranata sosial. Struktur masyarakat dan hubungan antar sistem sosial yang saling mendukung akan cenderung menuju kepada suatu kondisi yang seimbang dan dinamis (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007). Adapun untuk mempertahankan eksistensi kondisi sistem sosial yang seimbang dan dinamis, maka masing-masing sistem sosial maupun subsistemnya harus menjalankan fungsinya dengan konsep AGIL.

Fungsi dari konsep AGIL yaitu, pertama, adaptasi (*adaptation*), yaitu kemampuan anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan fisik dan sosialnya. Kedua, untuk mencapai tujuan (*goal attainment*) yang hendak diwujudkan, maka masyarakat harus memiliki kemampuan secara bersama-sama dalam mewujudkannya.. Ketiga, integritas (*integration*) yaitu masyarakat harus memiliki integritas (penyatuan) niat, kemauan dan kekompakan dalam menghadapi berbagai permasalahan sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Keempat, mempertahankan (*latency*) yaitu kemampuan masyarakat didalam mempertahankan dan mengembangkan kelembagaan pola-pola perilaku dalam mewujudkan cita-citanya sebagai prinsip atau pedoman tingkah laku di lingkungannya (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007). Pedoman tingkah laku masyarakat tersebut sangat terkait dengan tata nilai dan moral dan kondisi lingkungan fisik dan sosial di tempat masing-masing (Hasanuddin, 2005). Secara analogi, maka model pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik harus memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*).

4. Falsafah Hidup Orang Jawa

Menurut Koentjaraningrat (1994), kebudayaan jawa berasal dari orang-orang jawa yang berasal dari wilayah di pulau jawa khususnya di sekitar Negarigung. Sebagaimana diketahui bahwa ragam kebudayaan jawa di pulau jawa berasal dari 12 lingkungan sosial budaya yang berbeda yaitu: (a) Jawa Barat: (1) banten, (2) sunda, (b) Jawa Tengah: (3) pesisir kilen (pantura jawa tengah dan sebagian kecil masuk jawa barat), (4) pesisir wetan (pantura jawa tengah dan sebagian besar berada di wilayah pantura jawa timur), (5) banyumas, (6) bagelen, (7) Negarigung, (c) Jawa Timur: (8) manca negari, (9) suroboyo, (10) madura, (11) tanah sebrang wetan dan (12) blambangan. Adapun Negarigung yaitu suatu wilayah yang terletak di sekitar kraton Yogyakarta dan Surakarta.

Secara fisik wilayah Negarigung terletak di sekitar daerah aliran sungai Opak dan Progo, di tengah-tengah kompleks gunung Merapi-Merbabu-Lawu. Masyarakat di wilayah tersebut menggunakan bahasa jawa dengan logat jawa tengah solo-yogya. Wilayah ini juga merupakan pusat kebudayaan jawa-kraton yang dianggap sebagai sumber nilai-nilai dan norma-norma jawa. Di wilayah ini dicirikan oleh kehidupan keagamaan yang sinkritistik (perpaduan berbagai paham): hindu, budha, islam dan aliran kepercayaan (kejawen) (Koentjoroningrat, 1994).

Sebagaimana terjadi di daerah lain, sebagian besar masyarakat desa di dilayah sekitar Negarigung, bermata pencaharian sebagai petani: pemilik, penggarap dan buruh tani (Koentjoroningrat, 1994). Didalam menggarap sawah dan memanen hasilnya, petani tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga dilakukan secara bersama-sama. Kondisi ini menjadi awal dikenalnya istilah gotong royong di masyarakat petani jawa (Suseno, 1991).

Berawal adanya gotong royong yang berakar dari ikatan feodal sebagai pedoman bagi kehidupan ekonomi yang teratur dan prinsip hubungan kekuasaan dan ketaatan yang didasarkan pada tradisi menghasilkan bentuk ikatan desa yang

akhirnya menghasilkan ikatan adat yang sampai saat ini masih dilestarikan (Haryanto, 2005). Konsekuensi dari terbentuknya struktur desa dimana petani merasa harus patuh 100% kepada yang berkuasa atau yang menjalankan pemerintahan. Siapapun yang berkuasa atau menjalankan pemerintahannya, orang-orang desa mengakui adanya kekuasaan diatas desa (*supra desa*) tersebut, sehingga siapaun yang berkuasa atau menjalankan pemerintahan harus dihormati dan dipatuhi secara 100% titik (Koentjoroningrat, 1994 dan Haryanto, 2005). Kepatuhan tanpa *reserve* tersebut, kemudian memunculkan strata patron dan klien (Suseno, 1991).

Disamping itu, masyarakat jawa memiliki prinsip *rukun* dan *hormat*, dikenal pula sebagai pribadi yang *andap asor* yaitu watak yang selalu berupaya menutupi jati dirinya agar tidak diketahui oleh orang lain (Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2014). Orang jawa yang wataknya senang menonjolkan dirinya, sering disebut dengan istilah *kumalungkung* yaitu sebutan bagi seseorang yang berwatak sombong (Endraswara, 2012). Oleh karenanya, suatu bentuk kritik yang pedas dan menghujam bagi orang jawa, jika sampai disebut dengan istilah *wong kok ora duwe isin* (orang yang tidak tau malu) (Suseno, 1991, Haryanto, 2005).

Pendidikan tentang *subosito*, *unggah unggguh* (tata laku, sopan santun) dan empati kepada orang lain (siapapun) telah dilakukan oleh para orang tua kepada anaknya sejak anak masih kecil (Koentjoroningrat, 1944). Pendidikan di lingkungan keluarga, diawali dengan penanaman rasa *isin* (malu), *wedi* (takut) dan hormat kepada orang lain yang lebih: tua, pandai, kaya, lebih tinggi derajat kepangkatan dalam pekerjaan, dst. Selanjutnya, pendidikan tersebut berkembang menjadi prinsip rukun dan hormat (Suseno, 1991; Endraswara, 2012 dan Haryanto 2005).

Rasa rukun yang tertanam di dalam pribadi masyarakat jawa termanifestasi dengan adanya upaya secara aktif menahan diri, memendam rasa di dalam hati jika terdapat sesuatu hal yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan hati nuraninya (Suseno, 1991). Adapun secara pasif orang jawa selalu berupaya menjaga diri agar

tidak sampai ada kesan bahwa dirinya akan membuat konflik. Untuk menghindari hal tersebut, maka orang Jawa sering mengatakan *inje-inje*, walaupun sebenarnya tidak cocok (Suseno, 1991 dan Haryanto, 2005).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam mengungkapkan perasaan atau keinginannya, orang Jawa sering mengekspresikan dengan menggunakan bahasa semu atau tidak berterus terang (Suseno, 1991; Endraswara, 2012 dan Haryanto 2005). Bahasa-bahasa tersebut dapat berwujud bahasa tubuh, bahasa lisan dan bahasa tulis atau benda-benda di sekitarnya yang digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan, keinginan dan harapannya (Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2014; Endraswara, 2010 dan 2012 serta Santosa, 2010).

Dampak positif dari adanya individu yang memiliki kelebihan dalam hal *power* dan otoritas akan mendorong bersifat kebapaan atau melindungi kepada siapa pun yang lemah. Namun demikian, dampak negatifnya sering terjadi tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa atau orang yang merasa memiliki kelebihan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat lemah yang merasa tertindas akan berperilaku *etok-etok* (pura-pura) (Endraswara, 2010 dan 2012; Haryanto, 2005).

Adapun untuk menjadikan kehidupan individu serasi dan sukses di lingkungan masyarakat, maka para *winasis* telah memberikan petuah (*pitutur*) yang luhur. Pitutur luhur tersebut mencakup semua aspek kehidupan manusia Jawa seperti dalam hal: (1) tata krama pergaulan seperti *ngono yo ngono ning ojo ngono*, (2) hubungan orang tua dan anak seperti *kacang mongso ninggal lanjaran*, (3) hubungan kekerabatan dan sosial seperti *dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan*, (4) hubungan ilmu pengetahuan seperti *blilu tau pinter ra nglakoni*, (5) semangat dalam bekerja seperti *ojo nggege mongso*, (6) dalam hubungannya berusaha seperti *tuno satak bathi sanak*, dst (Endraswara, 2012 dan Santosa, 2010). Contoh pitutur luhur tersebut, hingga saat ini masih diingat dan dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa di pedesaan.

Memperhatikan etika hidup orang Jawa, maka pada saat ini perlu adanya reaktualisasi, sehingga keberadaannya akan berenergi positif dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Substansi dari aktualisasinya adalah: (1) di dalam masyarakat harus benar-benar dikembangkan prinsip rukun, (2) kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat tidak harus dimaknai sebagai konformitas, (3) kemenonjolan atau perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat harus dihormati, (4) implikasinya, senioritas tidak boleh menganggap dirinya sebagai penentu nasib, (5) nasib masyarakat bergantung kepada masyarakat itu sendiri.

5. Teori Besar (*Grand Theory*)

Grand Theory, oleh beberapa penulis sering ditulis dengan istilah yang berbeda-beda. Moleong (2004), menyebutnya dengan menggunakan istilah *Grand Theory*, sedangkan Salim (2006) menggunakan istilah Teori Besar dan Bielharz menggunakan istilah Teori Tinggi. Terlepas dari adanya perbedaan penggunaan istilah tersebut, makna dari *Grand Theory* (Teori Besar) adalah teori yang bersifat abstrak dan hampir terbebas oleh ruang dan waktu. Semakin terbebas dari ruang dan waktu, maka suatu tingkat teori semakin (mengarah kepada teori besar), begitu pula sebaliknya (Salim, 2006). Manfaat utama *Grand Theory* adalah sebagai payung dalam analisis data empirik (Salim, 2006).

Menurut Ihlaui (2008), dalam tingkatan teori ilmiah dapat dibedakan menjadi bagian empirik dan bagian abstrak. Teori-teori yang sangat terikat dengan ruang dan waktu (empiris) dapat diamati dan dirasakan langsung di lapangan. Adapun teori pada tingkat abstrak dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) teori besar atau teori tinggi atau *Grand Theory* yaitu teori yang hampir terbebas oleh ruang dan waktu, (2) teori menengah yaitu teori yang cukup abstrak, tetapi masih ada pengaruh ruang dan waktu, (3) teori rendah yaitu teori yang pengaruh ruang dan waktunya masih besar. Adapun tingkat empirik adalah semua konsep fenomena di lapangan yang dapat

diamati, diidentifikasi dan dianalisis untuk tujuan tertentu (Ihalauw, 2008 dan Salim, 2006).

Sebagaimana disebutkan oleh Salim (2006) bahwa yang termasuk di dalam *Grand Theory* yaitu teori ilmu psikologi dan sosiologi. Artinya di kedua bidang ilmu tersebut digunakan sebagai acuan teoritis baku. Kondisi ini mengandung makna bahwa di luar kedua bidang ilmu tersebut, *Grand Theory* nya menggunakan gabungan atau integrasi dari bidang ilmu psikologi dan sosiologi atau menggunakan gabungan ilmu lain yang terkait dengan bidang kajiannya.

Menurut Salim (2006) yang termasuk di dalam ranah *Grand Theory* ada 5 (lima) teori yaitu: (1) teori evolusi, (2) teori siklus, (3) teori fungsional, (4) teori konflik dan (5) teori dialektika. Teori-teori tersebut hampir bebas terhadap ruang dan Waktu. Teori Struktural fungsional Talcott Parsons di dalam model AGIL berada pada tingkatan teori tengahan yaitu cukup abstrak, namun ada pengaruh ruang dan waktu.

Konsep: adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan (*goal attainment*) dan *latency* dalam teori tindakan voluntari Talcott Parsons berada pada tingkatan teori rendahan yaitu pengaruh ruang dan waktunya besar. Adapun variabel fenomena AGIL berada pada tingkatan empirik atau lapangan sebab dapat diamati dan dirasakan keberadaannya secara langsung di lapangan.

Berdasar tingkat keterkaitannya dengan ruang dan waktu, maka teori pemberdayaan masuk di dalam ranah teori tengahan. Teori tengahan dicirikan oleh kondisi yang cukup abstrak, tetapi unsur ruang dan waktu masih agak berpengaruh (Ihalauw, 2008). Ketika pemberdayaan digabung dengan konsep masyarakat, maka akan masuk di ranah teori rendahan, sebab pengaruh ruang dan waktu semakin besar, sedangkan jika digabung dengan tempat, maka sudah masuk ranah empirik yang sangat terikat ruang dan waktu.

Berdasar kaitannya dengan pengaruh ruang dan waktu, semakin jelas bahwa konsep pemberdayaan masuk dalam kategori *Grand Theory* tengahan. Lingkup pengembangan kapasitas dalam pengembangan masyarakat: (1) sumberdaya manusia, (2) usaha, (3) kelembagaan dan (4) lingkungan masuk di ranah teori rendahan. Adapun variabel empirik dari ke empat kapasitas tersebut berada pada tingkat empirik yang dapat diamati, dirasakan dan dianalisis secara ilmiah.

Sebagai teori yang berada pada ranah abstrak, teori struktural fungsional dan teori pemberdayaan sering digunakan sebagai *Grand Theory* (tengahan) yang terkait dengan substansi kehidupan masyarakat. Ritzer dan Douglas J. Goodman (2007) dengan tegas menyebutkan bahwa teori struktural fungsional Talcott Parsons memiliki kekuatan dan kemampuannya dalam menghubungkan antara struktur sistem sosial berskala luas dengan pranata sosial.

Dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons disebutkan bahwa suatu sistem sosial di masyarakat dapat berkembang dengan harmonis dan dinamis jika antara sistem sosial terdapat jalinan ikatan saling mendukung. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan aktor yang mampu menerapkan konsep AGIL dalam mendorong terbentuknya pola-pola struktur di dalam sistem sosial (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007).

Dalam penerapan konsep AGIL, seseorang aktor pemberdaya sering disebut sebagai pemburu tujuan, sebab akan menggunakan berbagai alat dan sarana yang tersedia, sesuai dengan kondisi lingkungan dan tata nilainya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007; Susilo, 2008). Oleh karenanya, aktor pemberdaya masyarakat harus memiliki kelebihan kemampuan dan kepaahaman tentang prinsip pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2010b) serta memiliki: otoritas pengetahuan dan pengalaman, *power* dan aksesibilitas vertikal dan horisontal (Ife *et al.*, 2002).

Dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka seorang pekerja sosial atau aktor pemberdaya harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang *issue-issue* global yang mempengaruhinya (Ife *et al.*, 2002). Dalam hal ini, terdapat 26 prinsip pemberdayaan masyarakat yang perlu dipahami oleh para aktor pemberdaya (pekerja sosial) yaitu: (a) prinsip ekologis, (b) prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, (c) prinsip nilai-nilai lokal, (d) prinsip proses dan (e) prinsip hubungan antara global dan lokal.

Makna penting yang terdapat di dalam substansi prinsip ekologi” yaitu dalam konteks pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan mengedepankan keseimbangannya dalam: (1) keterkaitannya dengan semua aspek, (2) lebih mengutamakan pendekatan organik dari pada pendekatan mekanik, (3) serta adanya diversifikasi (Ife *et al.*, 2002). Hal ini penting diperhatikan, sebab tidak ada satu pun model yang dapat dipergunakan menyelesaikan berbagai masalah (Mardikanto, 2010b dan Davis, 2006). Disamping itu, masing-masing tempat memiliki keunikan tersendiri (Wolf, 1985 dalam Hasanuddin, 2005).

Makna penting yang terdapat di dalam substansi prinsip “keadilan sosial dan hak azasi manusia” adalah bahwa fakta yang terjadi saat ini perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat. Dimungkinkan masih banyak masyarakat yang kurang dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Ife *et al.*, 2002). Substansi penting di dalam prinsip ini yaitu adanya pemberdayaan dan pemberian kekuasaan masyarakat (penerima manfaat) untuk mendefinisikan sendiri kebutuhannya. Aktor pemberdaya (petugas sosial) hanya bertindak sebagai: edukator, diseminator, fasilitator, konsultan, supervisi (pembinaan), pemantau dan evaluator (Mardikanto, 2009).

Makna penting yang terdapat di dalam substansi prinsip “nilai-nilai lokal” adalah memberikan penghargaan bagi nilai-nilai lokal sebagai dasar pijakan dalam pemberdayaan masyarakat (Ife *et al.*, 2002). Substansi ini sangat penting

dipahami bagi para aktor pemberdaya atau pekerja sosial (Ife *et al.*, 2002), sehingga tidak memunculkan ketergantungan model lain (Pranaji, 2006 dan Wanadi, 1993). Sebagaimana kasus kegagalan program penggantian pohon jati dengan pepaya di wilayah *pseudoname* di Gunungkidul dan konservasi fisik di wilayah Jratunseluna telah membuktikan bahwa *local wisdom* menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat (Wahono *et al.*, 2005).

Makna penting yang terdapat di dalam substansi prinsip “proses” adalah bahwa suatu upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat diukur secara regid dalam satuan waktu yang singkat. Hal ini disebabkan tidak ada prosedur standar untuk mengukur kehidupan nyata (Feurstein, 1988 dalam Mikkelsen, 2003). Adapun substansi yang penting dalam prinsip adalah perlu adanya konsensus atau kesepakatan yang pasti dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai serta adanya langkah pemberdayaan yang mengedepankan prinsip keharmonisan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Ife *et al.*, 2002).

Dalam hal ini tugas aktor pemberdaya (petugas sosial) adalah mewujudkan sesuatu yang telah disepakati (Habib, 1993). Sebagaimana disebutkan oleh Newstrom dan Keith Davis (1997) bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat diperlukan kebersamaan semua anggota. Segala sesuatunya perlu dijalin dalam satu sistem komunikasi umpan balik yang berkesinambungan antara anggotanya (Pace dan Don F. Faules, 2013, Sutrisno, 2010), didukung oleh aturan main, struktur yang jelas dan ditaati (Mardikanto, 2010b) dan sesuai dengan budaya setempat (Sutrisno, 2010).

Makna penting yang terdapat di dalam substansi prinsip “hubungan kepentingan global dan lokal” adalah prinsip menghubungkan global dan lokal dalam pemberdayaan masyarakat bahwa dalam kondisi apapun kegiatan ditingkat lokal tidak dapat mengabaikan *issu* global. Oleh karenanya, para aktor pemberdaya masyarakat dituntut mampu memahami dan dapat menghubungkan *issu* global

dengan lokal sebagaimana dikiaskan dengan ungkapan berfikir global dan bertindak secara lokal (Wallace, 1996 dalam Ife *et al.*, 2002).

Disamping itu, masyarakat sebagai penerima manfaat harus paham tentang *issue-issue* yang sedang berkembang, sehingga dapat menghindarkan dari jeratan berbagai bentuk penindasan yang nyata maupun terselubung. Kondisi seperti ini yang sangat sulit diatasi di lingkungan petani, sebab pada umumnya petani sudah tergiur dengan berbagai hal yang bersifat instan dengan kemasan yang bagus dan menarik. Oleh karenanya, pendapat Pranaji (2006) dan Wanandi (1993) bahwa keterlibatan pemangku kepentingan eksternal sangat diperlukan sepanjang tidak menciptakan ketergantungan baru bagi masyarakat (penerima manfaat) perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan eksternal.

Makna utama perlunya para aktor pemberdaya (pekerja sosial) memahami prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut agar dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak terjadi bentuk-bentuk ketergantungan baru di tingkat masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Soetomo (2011) bahwa hingga saat ini dalam praktek pemberdayaan masyarakat masih dijumpai adanya perbedaan konsep berfikir dan makna pemberdayaan masyarakat. Paradigma pemberdayaan masyarakat, sudah berkembang dari konsep pembangunan masyarakat berbasis kepada pertumbuhan ekonomi menjadi berbasis pada *people-centred*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable* (Chamber, 1995 dalam Kartasmita, 1997 dan Soetomo, 2008). Namun demikian, dalam praktek di lapangan masih menggunakan pola dasar berfikir para pemegang atau pemangku kepentingan yang menentukan definisi kebutuhan masyarakat (Soetomo, 2011).

Terbukti, pemberian bantuan subsidi pupuk organik granul kepada petani sudah dianggap sebagai realisasi dari program pemberdayaan petani (BP4K, 2013). Padahal secara nyata-nyata bahwa kegiatan tersebut justru menciptakan ketergantungan baru bagi petani terhadap pemenuhan kebutuhan pupuk. Petani menjadi malas untuk

berfikir dan bekerja lebih keras. Petani akan beralasan bahwa jika butuh pupuk organik granul tinggal beli di kios saprodi pertanian. Sebaliknya, petani tidak mungkin membuat pupuk organik granul sendiri sebab disamping memerlukan tambahan biaya operasional dan peralatan yang dibutuhkan, maka dari substansi kandungan haranya tidak bertambah.

Kondisi tersebut sangat menghambat proses sosialisasi pengembangan paradigma baru pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada masyarakat itu sendiri. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini, konsep kebutuhan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih ditentukan oleh para pemegang kebijakan (Ife *et al.*, 2002). Contoh kongkrit, kegagalan program di wilayah Gunungkidul (Wahono *et al.*, 2005) dan konservasi lahan kering di Jratunseluna (Pranaji, 2006) karena tidak memperhatikan *local wisdom* dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kondisi tersebut, telah menguatkan pendapat Sumarjo (1999) bahwa saat ini masih terdapat *theoretical gap* yang menyebutkan bahwa: (1) teknokrat, birokrat dan bahwa modernis beranggapan bahwa semua teknologi yang sosialisasikan kepada masyarakat akan dengan mudah diadopsi dan diaplikasikannya, (2) insitusi atau kelembagaan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Terbukti bahwa perlawanan masyarakat (*pseudoname*) di wilayah Gunungkidul dengan berlaku diam dalam menolak pelaksanaan program yang dianggap tidak sesuai dengan *local wisdom* telah menjadi senjata yang sangat ampuh. Keberdayaan masyarakat (*pseudoname*) tersebut muncul setelah komunitas Cindelaras berupaya mendengar, memperhatikan, berempati, memfasilitasi pendefinisian kebutuhannya menjadi suatu gerakan riil dari komunitas *pseudoname* dalam meningkatkan kemampuan dirinya sendiri (Wahono *et al.*, 1998).

Memperhatikan adanya *Theoretical Gap*, serta adanya pergolakan kondisi masyarakat di tingkat empirik (Wahono *et al.*, 1998), maka dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu lebih mengedepankan pendekatan *local wisdom*.

Local wisdom di lingkungan wilayah penelitian ini adalah etika hidup orang Jawa (Suseno, 1991 dan Haryanto, 2005).

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip dasar etika hidup orang Jawa adalah rukun dan hormat (Suseno, 1991). Oleh karenanya, dapat dipahami jika terdapat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun yang berbenturan dengan prinsip rukun dan hormat akan ditentang masyarakat yang bersangkutan. Paling tidak, program tersebut tidak direspon dengan serius. Dalam kondisi semacam ini orang Jawa sering berpura-pura (*ethok-ethok*) agar tidak dianggap tidak setuju atau menentang (Haryanto, 2005). Memahami kondisi empirik seperti itu, maka dalam berbagai program apapun pelaksanaannya perlu didasarkan pada *local wisdom* dan dengan cara persuasif (Wahono, *et al.*, 2005).

Istilah persuasif (bujukan) merupakan tindakan untuk membangkitkan pengertian dan kesadaran kepada seseorang bahwa informasi yang disampaikan akan memberi manfaat bagi dirinya (Soedarmanto, 2003). Disamping itu, persuasif juga digunakan untuk meyakinkan kepada seseorang bahwa informasi atau pengetahuan atau fakta-fakta yang disampaikan benar-benar layak untuk diketahui (Mulyana, 2007). Bahkan secara tegas dikemukakan oleh: [Timprasert, *et al* (2014), Mickael (2014), Zhu dan Hildebrandt (2013)] bahwa komunikasi persuasif sangat efektif untuk mengubah perilaku seseorang.

Adapun tindakan yang paling mudah untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhannya [Brinol, *et al* (2015), Teng, *et al* (2015), Mayer, *et al* (2014), Floyd (2010), Sattler dan Nagel (2010), Mininni (2010)]. Contoh, keberhasilan program *Farmer Field School* (FFS) di Missouri (AS) dalam adopsi sistem pertanian organik karena adanya kesesuaian dengan: (1) latar belakang petani, (2) tata nilai dan (3) keyakinannya terhadap teknologi organik (Wiegel, 2009).

6. Model

a. Pengertian Model

Istilah model sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat, sebab istilah tersebut sering digunakan dalam pengertian sebagai: (1) contoh atau teladan, (2) bentuk, pola atau rancangan tertentu (Amirin, 1996). Model dalam pengertian contoh atau teladan dapat dikaitkan dengan berbagai fenomena atau gambaran sebenarnya di lapangan: model gunungapi, model pola tanam, model kepemimpinan. Adapun model dalam pengertian: bentuk, pola atau rancangan, dimaknai sebagai tiruan realita, seperti model pesawat terbang (Murdick dan Ross, 1982 dalam Amirin, 1996).

Oleh karenanya, model dapat dimaknai sebagai: gambaran, abstraksi, penyederhanaan dari suatu fenomena atau obyek nyata (Wiradi, 1980; Murdick dan Ross (1982) dalam Amirin, 1996; Eriyatno, 2003; Robbins, S dan Timothy A. Judge., 2007 serta Silalahi, 2009). Model dapat pula dimaknai sebagai penyederhanaan sebuah proses dari sistem yang kompleks, sehingga dapat mudah dipahami dan dijelaskan (Akhyar, 2010), sehingga dapat dimaknai sebagai sistem yang utuh (Amirin, 1996).

Jika dilihat dari hubungan antara konsep²³ dan proposisi²⁴, maka suatu model dibentuk atau dikonstruksi dari rangkaian beberapa proposisi secara terpadu menjadi satu sistem yang utuh (Ihalauw, 2008). Prinsip keterpaduan proposisi dalam satu sistem menjadi kunci penting dalam pembentukan sebuah model. Mengingat suatu model masih sangat terpengaruh dengan ruang dan waktu yang cukup besar, maka model dapat pula disepadankan dengan teori rendahan (Ihalauw, 2008).

²³ Konsep adalah simbol yang digunakan untuk memaknai fenomenon (Ihalauw, 2008), sedangkan Singarimbun *et al* (1987) memaknai sebagai istilah dan definisi yang menggambarkan fenomena secara abstrak dan atau kongkret.

²⁴ Proposisi adalah sebuah pernyataan tentang sifat fenomenon (Ihalauw, 2008), sedangkan Singarimbun *et al* (1987) menyebutnya sebagai hubungan logis dari dua konsep atau lebih.

b. Model Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan masyarakat, sampai saat ini tidak ada satupun Agen pemberdaya yang mampu melakukan kegiatannya sendirian (Ife *et al.*, 2008 dan Mardikanto, 2010b). Oleh karenanya, peran dan keterlibatan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan (Soetomo, 2011). Peran tersebut, dapat terkait dengan berbagai kedudukan agen (aktor) pemberdaya.

Departemen Pertanian Indonesia telah berupaya melakukan penelitian dan pengembangan metode yang disesuaikan dengan relung kondisi: (1) lingkungan, (2) sosial, (3) ekonomi dan (4) budaya masyarakat yaitu dengan menggunakan program PRIMA TANI²⁵. Salah satu program yang cukup dapat diterima oleh petani adalah model sistem tanam padi dengan cara legowo 4:1.

Disamping model tersebut, Pemerintah juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan model Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang kemudian dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah Sekolah Lapang (SL). Istilah tersebut di negara berkembang dikenal dengan istilah *Farmer Field School* (FFS). Kedua model tersebut termasuk model verbal dan telah cukup banyak diadopsi oleh petani.

c. Model Pemberdayaan Masyarakat Di Negara Lain

Pada dasarnya model-model pemberdayaan masyarakat di Negara lain tidak begitu berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber donor dana dan programnya sama yaitu Bank Dunia. Indikatornya adalah banyaknya penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia seperti FFS (*Farmer Field Schools*). Penelitian model pemberdayaan petani FFS banyak dilakukan di: (1) Philipina, Sri Langka, Peru, Zimbabwe dan di negara-negara Sub-Saharan Afrika (Davis, 2008), (2) Mozambique (Dzeco *et al.*, 2010).

²⁵ PRIMA TANI, Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakat Inovasi Teknologi Pertanian yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian Indonesia (Musyafak *et al.*, 2000), dilaksanakan berdasar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 496/2006 tentang Organisasi Pelaksanaan Prima Tani.

Namun tidak berarti bahwa model pemberdayaan petani FFS dapat dijadikan sebagai standard bagi setiap tempat atau negara, sebab kesemua wilayah memiliki keunikan dalam hal relung kondisi: sosial, ekonomi, budaya, politik dan iklim (Davis, 2008). Secara analogi, pernyataan Wolf (1985) telah dikutip oleh Hasanuddin (2005) bahwa perbedaan relung ekologis dan etnis mempengaruhi orientasi petani dalam penerimaan inovasi. Hal tersebut, telah dibuktikan oleh Hasanuddin (2005) bahwa etnis Jawa yang bertempat tinggal di Lampung lebih trampil dan memahami budidaya padi, sedangkan etnis Lampung lebih mahir dalam budidaya kakao.

Dari rangkuman hasil penelitian FFS di beberapa negara dunia ketiga, diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan di Indonesia adalah yang paling kurang berhasil (Davis, 2006). Tidak berhasilnya program FFS di Indonesia ditandai oleh: (1) tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap: perbaikan lingkungan, ekonomi dan kesehatan petani, (2) tidak ada proses difusi kepada petani non peserta didik, (3) tidak signifikan antara hasil dan besarnya biaya program, (4) kurangnya dampak kegiatan FFS di tingkat nasional (Davis, 2006).

Sebaliknya, Winarto (2007) menemukan bahwa alumni Sekolah Lapang di Subang (Indramayu), Ngalar (Yogya), Terbangi Besar (Lampung Selatan) telah berhasil mengembangkan metode pemberantasan hama dan penyakit tanaman serta pemuliaan bibit padi. Contoh lain, keberhasilan FFS di Missouri (AS) dalam adopsi sistem pertanian organik karena adanya kesesuaian dengan: (1) latar belakang petani, (2) tata nilai dan (3) keyakinannya terhadap teknologi (Wiegel, 2009).

d. Komponen Pemberdayaan Petani Dalam Alih Teknologi Pertanian Organik

Jika mengacu pada: (1) komponen pemberdayaan masyarakat, (2) pengertian proses pemberdayaan masyarakat, (3) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, (4) beberapa contoh model pemberdayaan masyarakat (petani) yang sudah ada, maka secara substantif komponen utama dari model pemberdayaan masyarakat (petani) adalah: (1) tujuan kondisi masyarakat petani yang diharapkan di masa depan, (2) agen

pemberdaya, (3) petani penerima manfaat, (4) teknologi organik, (5) faktor pendukung eksternal (pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya) serta (6) kepastian pasar yang menguntungkan.

B. Tinjauan Hasil Penelitian Para Peneliti Sebelumnya

Berikut ini akan disajikan sepuluh hasil penelitian para peneliti terdahulu (Tabel 2.1) yang terdiri dari 6 disertasi dan 4 Artikel pada Jurnal Internasional.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Para Peneliti Sebelumnya

| Peneliti Hal | Sumardjo (1999) | Imam Santoso (2004) |
|-------------------|---|---|
| | (1) | (2) |
| Judul | Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani (Kasus Di Propinsi Jawa Barat) | Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Tepian Hutan Berbasis Perilaku Adaptif: Analisis Sosio Kultural |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menemukan alternatif model penyuluhan pembangunan pertanian untuk pengembangan kemandirian petani 2. Mencari alternatif pengembangan kedinamisan penyuluh pertanian yang tepat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi sosio kultural yang melatar belakangi perilaku ekonomi petani tepian hutan non adaptif 2. Memperoleh model pemberdayaan ekonomi masyarakat petani tepian hutan yang berbasiskan perilaku adaptif |
| Lokasi Penelitian | Di 4 Kabupaten: Indramayu; Bandung; Cianjur; Bogor | Di Tiga Kabupaten: Tapanuli Selatan; Mandailing Natal; Banyumas |
| Jenis Penelitian | Kuantitatif - survai | Kuantitatif dan Kualitatif |
| Pengumpulan Data | survai, wawancara mendalam; stratified random sampling | Teknik gugus (multistage sampling); purposive sampling, wawancara terstruktur, life history, observasi dan pengamatan langsung di lapang |
| Cara Analisis | Uji statistik: uji kenormalan Liliefors; Analisis regresi berganda; analisis Path | Uji model dengan LISREL (<i>Linier Structural Relationship Model</i>) |
| Hasil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Model penyuluhan dengan pendekatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dialogis • Hadap masalah • Komunikasi konvergen 2. Kehandalan penyuluh mempengaruhi kemandirian petani | <p>Hasil rumusan model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model pemberdayaan ekonomi petani adaptif untuk memotong akar masalah: <ul style="list-style-type: none"> • Usaha non adaptif • Perilaku tanpa kaidah konservasi • Intervensi dari luar • Modal terbatas • Perilaku menerabas hutan • Kemampuan berwirausaha • Manajemen usahatani tidak efisien 2. Model pemberdayaan ekonomi petani |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | mencakup hal-hal: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan • Penyadaran • Pendampingan • Penguatan kelembagaan ekonomi |
| Tingkat Penelitian dan publikasi | Disertasi – Tidak dipublikasikan | Artikel (bagian dari disertasi) – jurnal nasional |

Lanjutan..... Tabel 2.1. Hasil penelitian sejenis oleh para peneliti sebelumnya

| Hal \ Peneliti | Jawahir Pardosi (2005) (3) | Joyakin Tampubolon (2006) (4) |
|--------------------|--|---|
| Judul | Pemberdayaan Peladang Berpindah: Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kabupaten Kutai Barat Di Propinsi Kalimantan Timur | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama – KUBE) |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji faktor-faktor determinan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keberdayaan peladang berpindah b. Kualitas penyuluhan memberdayakan peladang berpindah c. Pemenuhan kebutuhan peladang berpindah d. Kualitas pengelolaan peladangan 2. Merumuskan model penyuluhan yang tepat dan efektif bagi upaya pemberdayaan peladang berpindah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji sejauh mana tingkat kedinamisan kehidupan KUBE dan keberhasilan KUBE 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kedinamisan KUBE 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan KUBE 4. Merumuskan model yang efektif pemberdayaan fakir miskin melalui pendekatan KUBE |
| Lokasi Penelitian | Tiga Kabupaten, enam Kecamatan, 12 Desa di Propinsi Kalimantan Timur | Di tiga propinsi: Sumatera Utara; Jawa Timur dan Kalimantan Timur |
| Jenis Penelitian | Kuantitatif | Kualitatif dan Kuantitatif |
| Pengumpulan Data | Sampel purposive | survei; studi dokumen; observasi terstruktur dan wawancara terstruktur |
| Cara Analisis | Deskriptif Chi square, analisis Rank Spearman dan analisis jalur | Deskripsi eksploratif dan korelasional |
| Hasil | <p>Model penyuluhan yang tepat perlu menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan lokal 2. Penggunaan komunikasi konvergen 3. Substansi penyuluhan berbasis kebutuhan 4. Proses belajar orang dewasa 5. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang harus diperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Konsep pemberdayaan • Jenis / sifat kegiatan “....” • Kedinamisan “....” 2. Model “.....” harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman kondisi awal • Sosialisasi program • Pembentukan kelompok • Pelaksanaan program • Operasionalisasi usaha • Inovasi usaha • Evaluasi keberhasilan |
| Tingkat Penelitian | Abstrak – Disertasi (e-abstract) - IPB user | Abstrak – Disertasi (e-abstract) - IPB |

| | | |
|---------------|--|--|
| dan publikasi | | |
|---------------|--|--|

Lanjutan..... Tabel 2.1. Hasil penelitian sejenis oleh para peneliti sebelumnya

| Peneliti Hal | Ponniah Anandajayasekaram; Kristin E. Davis; Sindu Workneh (2007) | Robert Agunga, Chris Igodan (2007) |
|----------------------------------|---|---|
| | (5) | (6) |
| Judul | <i>Farmer Field Schools: An Alternative to Existing Extension Systems? Experience from Eastern and Southern Africa</i> | <i>Organic Farmers' Need for and Attitude Towards Extension</i> |
| Tujuan | Mereview dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan pada lima tempat di wilayah Zfrika bagian Timur dan Selatan. | 1. Identifikasi petani yang melakukan sistem pertanian berkelanjutan 2. Menganalisis sikap petani yang melakukan sistem pertanian berkelanjutan terhadap keberadaan penyuluh pertanian |
| Lokasi Penelitian | Afrika bagian Timur dan Selatan: Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia dan Zimbabwe | Petani inovatif organik dan anggota asosiasi ekologi pangan dan pertanian (<i>ecological food and farm assosiation</i>) di OHIO (AS) |
| Jenis Penelitian | Studi kasus; Penilaian Dampak FFS | Survei (pendekatan kuantitatif) |
| Pengumpulan Data | Analisis dokumen; wawancara dengan informan kunci dan kelompok; observasi; | Pengiriman kuesioner |
| Cara Analisis | Review dengan cara curah pendapat para peneliti dalam kegiatan workshop dan identifikasi isu-isu kunci | Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) |
| Hasil | FFS bukan pendekatan baru, tetapi prinsip-prinsipnya dapat untuk meningkatkan efektivitas sistem penyuluhan pertanian | 1. Hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan sistem pertanian yang berkelanjutan 2. Penyuluh pertanian yang profesional lebih diminati urutan 11 dari 13 komponen 3. Hamparan lahan tetap menjadi prioritas utama dalam proses difusi inovasi 4. Hambatan regulasi dari pemerintah |
| Tingkat Penelitian dan publikasi | (artikel ilmiah bagian dari disertasi) Jurnal Internasional | American-Journal of Extension |

Lanjutan..... Tabel 2.1. Hasil penelitian sejenis oleh para peneliti sebelumnya

| Peneliti Hal | Kristin E Davis (2008) | Dzeco, C. Dzeco, C. Amilai, A. Cristovao (2010) |
|-----------------|---|--|
| | (7) | (8) |
| Judul | <i>Extension in Sub-Saharan Africa: Overview and Assessment of Past and Current Models and Future Prospects</i> | <i>Farm Field Schools And farmer's Empowerment In Mozambique: A Pilot Study</i> |
| Tujuan | 1. Peninjauan ulang pengalaman model penyuluhan di wilayah Sub-Saharan | 1. Menganalisis isu-isu yang berkembang di dalam sekolah lapang dan peran petani |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | Africa (SSA) 2. Analisis prospek model penyuluhan di masa mendatang | dalam mendefinisikan sekolah lapang 2. Memahami dampak sekolah lapang terhadap: pemberdayaan individu, komunitas dan organisasi |
| Lokasi Penelitian | Wilayah Sub-Saharan Africa | Wilayah Boane di Mozambique. Afrika bagian Selatan |
| Jenis Penelitian | Analisis Dokumen | Survai |
| Pengumpulan Data | Melalui internet, survai pada anggota jaringan forum Pelayanan Pertanian Afrika | Observasi; wawancara semi terstruktur |
| Cara Analisis | Peninjauan ulang 16 (enam belas) model penyuluhan pertanian disajikan dalam bentuk deskripsi analisis | Membandingkan tiga aspek utama yaitu: (1) partisipasi petani terhadap pengalaman lokal dan pengambilan keputusan adaptasi teknologi, (2) partisipasi petani dalam organisasi dan inisiatif dalam sekolah lapang, (3) keterlibatan petani dalam kegiatan proyek percontohan |
| Hasil | 1. Tidak ada satupun model penyuluhan pertanian yang cocok untuk standar / pedoman di berbagai tempat 2. Adanya model pembandingan dapat dijadikan sebagai penyempurnaan model yang sudah ada | FFS berkontribusi baik untuk: 1. Pemberdayaan petani anggota 2. Penguatan hubungan antar petani 3. Penguatan hubungan antara petani dengan penyuluh 4. Peningkatan kapasitas petani anggota 5. FFS dapat membantu pemberdayaan tingkat individu dan kelompok |
| Tingkat Penelitian dan publikasi | Journal of International Agricultural and Extension Education. | Dissertation paper presented on 9 th European IFSA Symposium, 4-7 Juli 2010 |

Lanjutan..... Tabel 2.1. Hasil penelitian sejenis oleh para peneliti sebelumnya

| Peneliti Hal | Mulyanto (2013) (9) | Sarah Rum Handayani (2013) (10) |
|-----------------|--|--|
| Judul | Pelatihan Pengembangan Desain Batik Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha (Studi Kasus Pelatihan Di Perusahaan Kecil Batik Dewi Ratih Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen | Pemberdayaan Perempuan Pembatik Pada Pengembangan Industri Batik Di Sragen: Studi Kasus Di Desa Wisata Kliwonan Kec. Masaran |
| Tujuan | 1. Mendeskripsi profil perusahaan batik Dewi Ratih Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen 2. Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan desain batik di perusahaan batik Dewi Ratih 3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terkait dengan pengembangan desain batik di perusahaan Dewi Ratih 4. Merumuskan prinsip-prinsip dasar pelatihan pengembangan desain batik | 1. Menganalisis kondisi umum perempuan pembatik, upayanya dalam peningkatan mutu produk dan status mereka dalam bidang pekerjaan 2. Menganalisis persepsi perempuan pembatik tentang pentingnya peningkatan pengetahuan, ketrampilan produktif, penguasaan teknologi dan pengelolaan usaha produktif. 3. Menganalisis partisipasi perempuan pembatik dalam upaya pengembangan industri batik di Desa Wisata Kliwonan |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| | yang dapat dijadikan acuan dalam pelatihan pengembangan batik di usaha kecil batik sebagai upaya pemberdayaan | 4. Menganalisis peran forum rembug klaster batik dalam pemberdayaan perempuan pembatik. 5. Merumuskan model alternatif pemberdayaan perempuan yang tepat guna di masa mendatang |
| Lokasi Penelitian | Perusahaan batik Dewi Ratih, Desa Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen | Desa Wisata Kliwonan, Kec. Masaran, Sragen |
| Jenis Penelitian | Kualitatif Studi Kasus tunggal terpancang | Kualitatif - deskriptif |
| Pengumpulan Data | Observasi, wawancara mendalam | Wawancara mendalam |
| Cara Analisis | Model induktif interaktif | Model induktif interaktif |
| Hasil | 1. Profil perusahaan terdiri daridst 2. Pengembangan desain batik diserahkan kepada pembatiknya 3. Faktor pendukung: fasilitator dan SDM kompeten, lingkungan alam mendukung, tersedia banyak model motif batik, karyawan dapat beraktualisasi diri. Faktor penghambat: pengeringan tergantung matahari, pada musim panen padi perusahaan kesulitan memperoleh pembatik 4. Proses pelatihan mengacu pendidikan orang dewasa, pengembangan kreativitas dan belajar mandiri. Proses pelatihan disesuaikan dengan kondisi sos-bud dan sumberdaya perusahaan. | 1. Perempuan pembatik di Desa Wisata Kliwonan berperan ganda sebagai pembatik dan pekerja lantara. 2. Persepsi positif sangat dipengaruhi oleh: sikap, motif, harapan, situasi dan pengalaman kerja. Persepsi negatif: kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan belum setara dengan laki-laki pembatik. 3. Partisipasi perempuan pembatik meliputi: kontak dengan pihak lain, menyerap dan memberi tanggapan, perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional 4. Forum rembug klaster sudah tidak berfungsi, maka perlu diaktifkan lagi. 5. Dalam proses pemberdayaan perempuan perlu didasarkan padaprinsip-prinsip dasar pemberdayaan |
| Tingkat Penelitian dan publikasi | Disertasi (Tidak dipublikasikan) | Disertasi (tidak dipublikasikan) |

Lanjutan..... Tabel 2.1. Hasil penelitian sejenis oleh para peneliti sebelumnya

| Peneliti | Joko Winarno |
|----------|---|
| Hal | (11) |
| Judul | Model Pemberdayaan Petani Dalam Alih Teknologi Pertanian Organik (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Makaryo Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar) |
| Tujuan | 1. Identifikasi kondisi alih teknologi pertanian organik dan faktor-faktor yang menyebabkan petani sulit melaksanakan alih teknologi pertanian organik. 2. Mengkonstruksi model pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik yang dilakukan oleh Kelompok Tani Rukun Makaryo (KTRM). 3. Mendeskripsi dampaknya bagi kelompok tani lainnya dalam alih teknologi pertanian organik. 4. Merumuskan model pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik yang direkomendasi. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Lokasi Penelitian | Kelompok Tani Rukun Makaryo Di Desa Pereng, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar |
| Jenis Penelitian | Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi |
| Pengumpulan Data | Observasi partisipatif; wawancara mendalam; analisis dokumen |
| Cara Analisis Data | Model Induktif interaktif |
| Hasil | <p>Proposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengembangan pertanian organik di suatu daerah akan menjadi semakin baik, jika senantiasa didukung oleh: (a) penguatan jejaring petani kader, (b) pilihan teknologi organik dan (c) penerapan prinsip-prinsip kebutuhan kader dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik serta (d) kelembagaan petani. 1.b. Keberhasilan pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik di suatu daerah akan menjadi semakin baik, jika senantiasa dilaksanakan dengan pendekatan <i>local wisdom</i> yaitu prinsip rukun dan hormat dengan cara persuasif menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan kader dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik. 2. Model pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik (kelompok tani Rukun Makaryo), dilakukan oleh individu tunggal sesuai dengan pola pikir dan dominasi kepentingannya dengan memanfaatkan semua kegiatan kesehariannya, sehingga senantiasa kurang mengakomodasi kepentingan: (1) kader dan (2) jejaring dukungan dari pemangku kepentingan eksternal. 3. Upaya pengembangan inovasi dan kegiatan kelompok tani kader dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik serta sosialisasinya, senantiasa didorong kuat oleh berbagai permasalahan yang tidak diakomodasi oleh kelompok tani Rukun Makaryo. 4. Pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik akan semakin berhasil dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, jika senantiasa: (1) dijadikannya: (a) kemandirian petani, (b) penguatan jejaring petani, (c) pilihan teknologi organik, (d) sertifikasi padi organik dan (e) penguatan jejaring pelaku pasar sebagai visi yang kuat dalam pemberdayaan petani, (2) dilakukannya oleh aktor (tokoh penerus) atau lembaga petani yang memiliki: (a) <i>power</i>, (b) otoritas pengetahuan dan pengalaman, (c) akses vertikal dan horisontal serta (d) jiwa keteladanan (3) dilaksanakannya dengan mengedepankan <i>local wisdom</i> yaitu prinsip rukun dan hormat dengan cara persuasif menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan kader dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik. |
| Tingkat Penelitian dan publikasi | Disertasi dan jurnal Internasional |

Berdasar hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut pada Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa pola pikir para peneliti, kecuali Mulyanto dan Sarah Rum Handayani, di dalam asumsinya masih bernuansa pendekatan *top-down*. Artinya, permasalahan yang akan diungkap di dalam penelitian didasarkan pada pandangan bahwa posisi masyarakat (petani) sebagai penerima manfaat dalam keadaan kurang berdaya atau tidak berdaya, sehingga diperlukan adanya pemberian kekuasaan dan pengembangan kapasitas. Agar petani dapat mandiri dan sejahtera,

commit to user

maka perlu melaksanakan: kegiatan, tindakan dan berfikir sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh para peneliti tersebut.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut masih bernuansa kognitif dan psikomotorik. Artinya, semua peneliti masih berasumsi bahwa dalam pemberdayaan masyarakat (petani), status masyarakat (petani) sebagai penerima manfaat dalam posisi atau kondisi kurang berdaya yang disebabkan karena keterbatasan hal-hal tertentu, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya.

Metode penelitian yang dipilih cukup bervariasi yang disesuaikan dengan pilihan pendekatannya. Berdasar pendekatan dan asumsi yang diyakini peneliti, maka variabel penelitian atau dimensi penelitian yang dirumuskan masih sangat dipengaruhi oleh teori-teori yang mendasarinya, bukan didasarkan pada kemauan penerima manfaat.

Oleh karenanya, produknya masih dalam tataran normatif yaitu terkait dengan proses peningkatan kognitif dan psikomotorik untuk memperoleh kondisi dimasa depan yang lebih baik. Dalam penelitian sejenis ini tidak ada yang mengungkap fenomena pemberdayaan kepada masyarakat (petani) dalam arti bahwa masyarakat tersebut sebagai penerima manfaat bukannya tidak mampu, bukannya tidak memiliki pengetahuan (kognitif dan psikomotorik), tetapi karena mereka tidak mau melakukan perubahan perilaku yang disebabkan oleh alasan tertentu. Dasar pemikiran afektif inilah yang akan ditonjolkan sekaligus menjadi pembeda dengan review penelitian yang sudah dilakukan tersebut.

C. Kerangka Penelitian

1. Hasil Penelitian Pendahuluan

Kelompok tani Rukun Makaryo, berada di Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Kelompok tani ini, didirikan pada tahun 1993 dan diaktifkan kembali pada tahun 1999 karena adanya dua alasan penting yaitu: (1)

ada informasi tentang rencana pemerintah akan memberikan berbagai bantuan kepada kelompok tani yang aktif melaksanakan kegiatannya, (2) adanya kesadaran dari beberapa tokoh petani bahwa saat itu petani sudah sangat tergantung kepada berbagai asupan kimia dan kerusakan tanah sawah yang diakibatkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia.

Oleh karenanya, para tokoh Pereng memandang perlu segera mengaktifkan kembali kelompok tani Rukun Makaryo sebagai wadah untuk mencukupi kebutuhan pupuk kimia [Informan 1.1 (T17)]. Sementara itu, informan 1.1 mulai menginisiasi penggunaan pupuk organik untuk mengatasi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, sekaligus memperbaiki kesuburan tanahnya [Informan 1.1 (T17)].

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan 1.1 (T24), diperoleh simpulan bahwa sejak awal (1999) dirinya telah menyadari bahwa kendala yang akan dihadapi dalam sosialisasi bahaya penggunaan pupuk dan pestisida kimia sangat besar. Kendala pertama, sikap petani yang telah nyaman menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Kendala lain, berasal dari pabrikan dan Birokrat yang tetap berorientasi pada peningkatan produksi pertanian. Sebagaimana tercermin dari penuturan informan 1.1 *sekarang ini petani sudah dikuasai oleh kapitalis, sedangkan Birokrasi jadi teman kapitalis, makanya saya dimana-mana selalu bicara kita harus mengubah pola pikir petani agar kembali kepada jati dirinya. Jati diri kita kan negara agraris* (T24). *Petani itu tidak mau diajari, selalu curiga terhadap orang lain, sehingga sangat susah mengubah sikapnya* (T16).

Mengingat kendala tersebut, maka dimana saja informan 1.1 selalu bicara lantang tentang bahaya pupuk dan pestisida kimia sintetis. Hambatan yang paling besar adalah karena petani sudah menjadi manja dan inginnya serba praktis, instan dan tidak mau berfikir rumit. Atas dasar itu, maka kelompok tani Rukun Makaryo menentang dengan keras penggunaan racun kimia dan memandang perlu segera melakukan gerakan perubahan [Informan 1.1 (T17)].

Sebagaimana dituturkan Informan 1.1 *kondisi tanah sudah semakin parah, petani sudah tidak mengetahui sistem pertanian organik maka petani harus direvitalisasi pola pikirnya. Penggunaan pupuk dan pestisida organik sudah tidak boleh ditunda-tunda, sebab dampak penggunaan racun yang mematikan itu luar biasa. Lima belas tahun yang lalu di belakang rumah ini masih ada betet, ada jalak, sekarang tidak ada sebab makanannya disemprot racun* (wawancara tgl 29 Desember 2009 dan T17).

Pada awal sosialisasi (2003) sebanyak 85% pengurus menolak dengan keras dan hanya 7% yang setuju tetapi belum mencoba penggunaan pupuk organik. Ungkapan penolakan dari Tokoh pengurus, sebagaimana dituturkan informan 1.1, *ini akan menemui apa, kotoran sapi digunakan, pupuk yang dari toko saja yang harganya mahal tidak dapat menyuburkan tanaman, padahal yang membuat Insinyur. Apalagi kotoran sapi pasti tidak dapat menyuburkan tanah, apa akan dibawa kejaman kekurangan makan lagi* (wawancara tgl 29 Desember 2009).

Mengingat peningkatan jumlah petani yang menggunakan pupuk organik sangat lambat, maka informan 1.1 mengajak pengurus lain untuk mengadakan pelatihan pembuatan pupuk. Usulan tersebut, terlaksana pada tahun 2004 dan 2005 secara mandiri mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik diikuti oleh pengurus dan sebagian kecil petani di sekitarnya.

Hasilnya, 7 (tujuh) pengurus yang mulai mencoba menggunakan pupuk organik yaitu: Pak Giyo Arianto, Pak Tukiman, Pak Sutrisno, Pak Citro Jono, Pak Kasimin dan Pak Sukasmin yang menjadi contoh bagi petani di sekitarnya. Adapun sejak tahun 2007, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Komunitas Kreatif (IKK) Kec. Mojogedang dan Dinas Pertanian. Hasilnya pada tahun 2009 jumlah pengurus yang mengarap sawah semi organik menjadi 28 orang dan 2 orang sudah murni.

Namun demikian, sejak tahun 2009 diinternal kelompok tani mulai terjadi konflik yang disebabkan oleh: (1) terlalu kerasnya informan 1.1 dalam menolak penggunaan pupuk dan pestisida kimia, sehingga banyak pengurus yang sakit hati dan keluar dari kelompok tani, (2) tidak adanya apresiasi atas peran dan inovasi yang dilakukan oleh pengurus lain dalam alih teknologi pertanian organik, (3) tidak adanya pendelegasian tugas sosialisasi oleh pengurus lainnya. Sedangkan pada tanggal 23 April 2013, kelompok tani “Tani Makaryo” bubar.

2. Pola Pikir Penelitian

Dari penelitian pendahuluan dapat diketahui bahwa kegiatan kelompok tani Rukun Makaryo dalam melaksanakan pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik dilatar belakangi oleh: (1) kesadaran para tokoh Pereng tentang adanya ketergantungan petani terhadap berbagai asupan kimia, (2) kerusakan tanah sawah yang diakibatkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatannya, kelompok tani Rukun Makaryo sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) keberadaan tokoh perintis, (2) kondisi lahan dan pengembangan pertanian organik dan (3) dinamika kelompok tani. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) peran Dinas Pertanian, (2) peran BP4K, (3) peran Perguruan Tinggi dan (4) peran pemerhati pertanian organik.

Potensi pengembangan pertanian organik di wilayah Desa Pereng dianalisis berdasar berbagai penuturan dan kegiatan informan dalam menggarap sawah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan petani sulit diajak melaksanakan alih teknologi pertanian organik disimpulkan berdasar hasil analisis penuturan para informan. Hasil penuturan informan (terpilih) digunakan pula untuk mensimpulkan prinsip-prinsip kebutuhan petani dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik.

Komponen model pemberdayaan eksisting, dikonstruksi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis semua aktor yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan kelompok tani Rukun Makaryo dalam pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik. Berdasar kajian teori, diketahui bahwa komponen model pemberdayaa petani dalam alih teknologi pertanian organik ada 6 (enam) yaitu: (1) kejelasan tujuan kegiatan, (2) peran agensi (aktor), (3) keberadaan petani sebagai penerima manfaat, (4) keberadaan teknologi organik, (5) dukungan dari pemangku kebijakan kebijakan dan pemangku kepentingan eksternal, (6) keberadaan pasar bagi produk beras perlakuan organik yang menguntungkan bagi petani.

Adapun dampak bagi kelompok tani lain diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan sikap dan tindakan kelompok tani kader dalam kaitannya dengan peran kelompok tani Rukun Makaryo sebagai agen (aktor) pemberdaya. Adapun substansi yang dicermati adalah: (1) teknologi organik yang diadopsi dan dikembangkan, (2) berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya memotivasi kepada petani lain agar menggunakan pupuk dan pestisida organik serta (3) upaya kelompok tani kader dalam meningkatkan rasa kepemilikan terhadap keberadaan kelompok tani.

Akhirnya berbagai kelebihan dan kelemahan yang ada pada model eksisting serta hasil analisis temuan penting yang terkait, digunakan sebagai masukan dalam perumusan model pemberdayaan petani dalam alih teknologi pertanian organik (yang direkomendasi). Substansi yang ditonjolkan dalam model akhir ini adalah upaya memperbaiki model eksisting yaitu dengan menggunakan pendekatan local wisdom (etika hidup orang jawa) dengan cara persuasif memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan petani dalam melaksanakan alih teknologi pertanian organik.

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian, maka kerangka pikir penelitian ini disajikan pada Diagram 2.1.

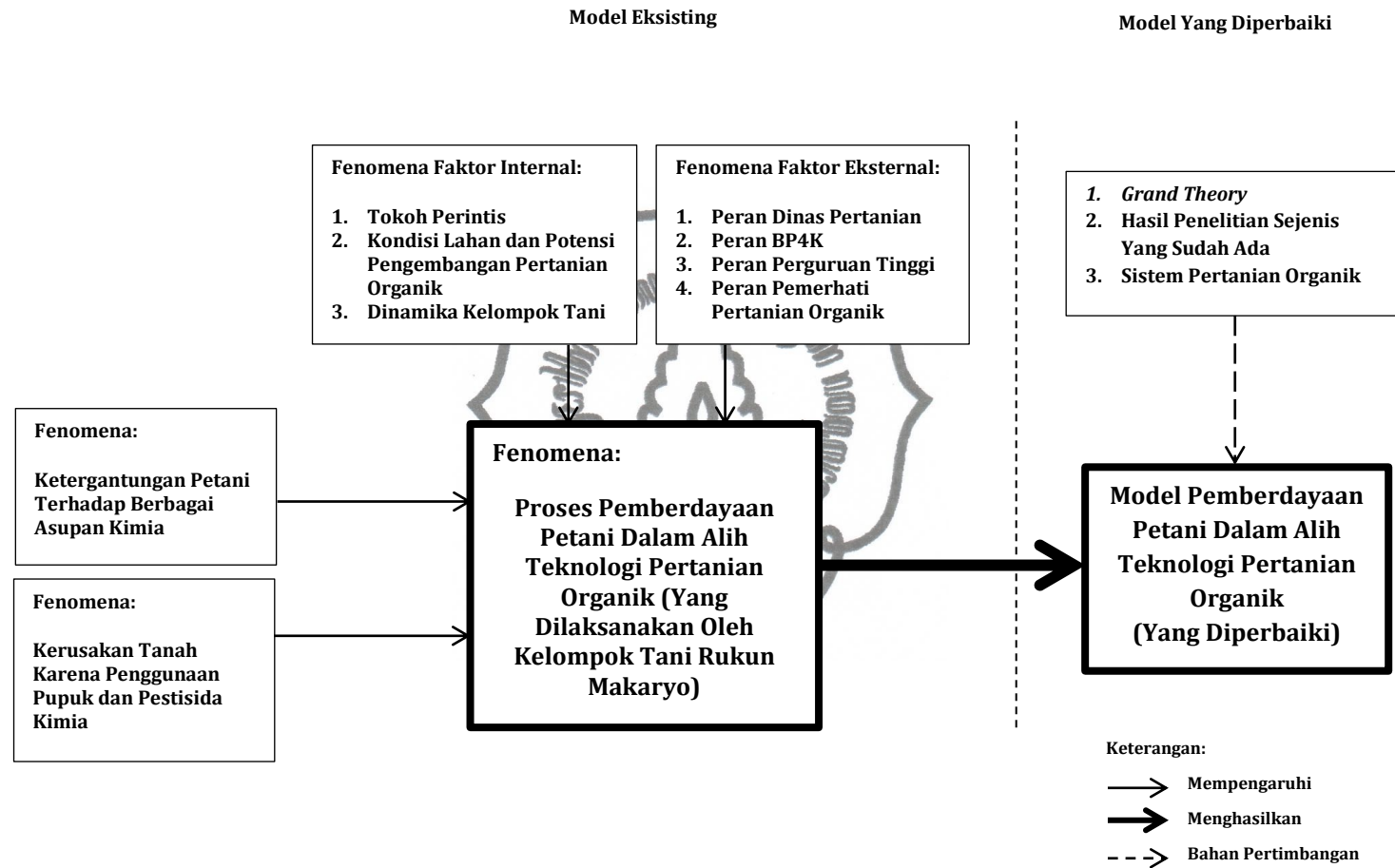


Diagram 2.1. Kerangka Pikir Penelitian